



**P U T U S A N**

Nomor 2350 K/Pid.Sus/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **IMAN HUD, S.IP., M.Si.**;  
Tempat Lahir : Ujung Pandang;  
Umur/Tanggal Lahir : 50 tahun/29 Maret 1972;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Baji Gau I Nomor 22 RT 003 RW 001, Kelurahan Baji Mappasunggu, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mantan Kasatpol PP Kota Makassar;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023, kemudian dialihkan penahanannya menjadi tahanan Kota sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu;

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Halaman 1 dari 108 halaman Putusan Nomor 2350 K/Pid.Sus/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP  
*juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Subsidaire : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Atau;

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 29 Agustus 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IMAN HUD, S.IP., M.Si., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair;

Halaman 2 dari 108 halaman Putusan Nomor 2350 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IMAN HUD, S.IP., M.Si., dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan selama Terdakwa ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa IMAN HUD, S.IP., M.Si., senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
4. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa IMAN HUD, S.IP., M.Si., dan Saksi Abdul Rahim, S.T., untuk membayar uang pengganti senilai Rp4.819.432.500,00 (empat miliar delapan ratus sembilan belas juta empat ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayarkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa disita oleh Jaksa untuk dilelang guna menutupi pembayaran uang pengganti tersebut dan jika Terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup maka diganti dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa IMAN HUD, S.IP., M.Si., segera ditahan di Rutan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 1493, digunakan untuk pembuktian dalam perkara atas nama Terdakwa Abdul Rahim, S.T.;
  2. Barang bukti nomor urut 1494 sampai dengan nomor urut 1521 [uang tunai sebesar Rp3.758.280.000,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah)];  
Dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa IMAN HUD, S.IP., M.Si., dan Saksi Abdul Rahim, S.T.;
7. Memerintahkan agar Terdakwa IMAN HUD, S.IP., M.Si., dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);  
  
Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Halaman 3 dari 108 halaman Putusan Nomor 2350 K/Pid.Sus/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Makassar Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks tanggal 11 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IMAN HUD, SIP., M.Si., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair, Subsidair, dan dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair, Subsidair, dan dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:

1. DPA Tahun 2019;
2. DPA Tahun 2020;

Daftar Nominatif Tahun 2019;

1. Belanja jasa tenaga pendukung kegiatan pembinaan ketertiban, keamanan, dan perlindungan masyarakat untuk bulan Januari 2019 tertanggal 18 Maret 2019;
2. Belanja jasa tenaga pendukung kegiatan pembinaan ketertiban, keamanan, dan perlindungan masyarakat untuk bulan Februari 2019 tertanggal 18 Maret 2019;
3. Belanja jasa tenaga pendukung kegiatan pembinaan ketertiban, keamanan, dan perlindungan masyarakat untuk bulan Maret 2019 tertanggal 19 Maret 2019;
4. Belanja jasa tenaga pendukung kegiatan pembinaan ketertiban, keamanan, dan perlindungan masyarakat untuk bulan April 2019 tertanggal 8 April 2019;
5. Belanja jasa tenaga pendukung kegiatan pembinaan ketertiban, keamanan, dan perlindungan masyarakat untuk bulan Mei 2019 tertanggal 17 Mei 2019;
6. Belanja jasa tenaga pendukung kegiatan pembinaan ketertiban, keamanan, dan perlindungan masyarakat untuk bulan Juni 2019 tertanggal 25 Juni 2019;

Halaman 4 dari 108 halaman Putusan Nomor 2350 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Belanja jasa tenaga pendukung kegiatan pembinaan ketertiban, keamanan, dan perlindungan masyarakat untuk bulan Juli 2019 tertanggal 24 Juli 2019;
8. Belanja jasa tenaga pendukung kegiatan pembinaan ketertiban, keamanan, dan perlindungan masyarakat untuk bulan Agustus 2019 tertanggal;
9. Belanja jasa tenaga pendukung kegiatan pembinaan ketertiban, keamanan, dan perlindungan masyarakat untuk bulan September 2019 tertanggal 7 Oktober 2019;
10. Belanja jasa tenaga pendukung kegiatan pembinaan ketertiban, keamanan, dan perlindungan masyarakat untuk bulan Oktober 2019 tertanggal 7 Oktober 2019;
11. Belanja jasa tenaga pendukung kegiatan pembinaan ketertiban, keamanan, dan perlindungan masyarakat untuk bulan November 2019 tertanggal 11 November 2019;
12. Belanja jasa tenaga pendukung kegiatan pembinaan ketertiban, keamanan, dan perlindungan masyarakat untuk bulan Desember 2019 tertanggal 9 Desember 2019;

### Daftar Nominatif Tahun 2020;

1. Belanja jasa tenaga pendukung kegiatan pembinaan ketertiban, keamanan, dan perlindungan masyarakat untuk bulan Januari 2020 tertanggal;
2. Belanja jasa tenaga pendukung kegiatan pembinaan ketertiban, keamanan, dan perlindungan masyarakat untuk bulan Februari 2020 tertanggal 10 Februari 2020;
3. Belanja jasa tenaga pendukung kegiatan pembinaan ketertiban, keamanan, dan perlindungan masyarakat untuk bulan Maret 2020 tertanggal 17 Maret 2020;
4. Belanja jasa tenaga pendukung kegiatan pembinaan ketertiban, keamanan, dan perlindungan masyarakat untuk bulan April 2020 tertanggal 13 April 2020;

Halaman 5 dari 108 halaman Putusan Nomor 2350 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Belanja jasa tenaga pendukung kegiatan pembinaan ketertiban, keamanan, dan perlindungan masyarakat untuk bulan Mei 2020 tertanggal 6 Mei 2020;
6. Belanja jasa tenaga pendukung kegiatan pembinaan ketertiban, keamanan, dan perlindungan masyarakat untuk bulan Juni 2020 tertanggal 5 Juni 2020;
7. Belanja jasa tenaga pendukung kegiatan pembinaan ketertiban, keamanan, dan perlindungan masyarakat untuk bulan Juli 2020 tertanggal 23 Juli 2020;
8. Belanja jasa tenaga pendukung kegiatan pembinaan ketertiban, keamanan, dan perlindungan masyarakat untuk bulan Agustus 2020 tertanggal 28 Agustus 2020;
9. Belanja jasa tenaga pendukung kegiatan pembinaan ketertiban, keamanan, dan perlindungan masyarakat untuk bulan September 2020 tertanggal 22 September 2020;
10. Belanja jasa tenaga pendukung kegiatan pembinaan ketertiban, keamanan, dan perlindungan masyarakat untuk bulan Oktober 2020 tertanggal 23 Oktober 2020;
11. Belanja jasa tenaga pendukung kegiatan pembinaan ketertiban, keamanan, dan perlindungan masyarakat untuk bulan November 2020 tertanggal 24 November 2020;
12. Belanja jasa tenaga pendukung kegiatan pembinaan ketertiban, keamanan, dan perlindungan masyarakat untuk bulan Desember 2020 tertanggal 22 Desember 2020;

## Pengendalian Massa;

1. DPA Tahun 2017;
2. DPA Tahun 2018;
3. DPA Tahun 2019;
4. DPA Tahun 2020;

## Daftar Nominatif Tahun 2017;

1. Daftar honorarium panitia pelaksana kegiatan operasional pengendalian massa bulan Januari 2017;

Halaman 6 dari 108 halaman Putusan Nomor 2350 K/Pid.Sus/2024



2. Daftar honorarium panitia pelaksana kegiatan operasional pengendalian massa bulan Februari 2017;
3. Daftar honorarium panitia pelaksana kegiatan operasional pengendalian massa bulan Maret 2017;
4. Daftar honorarium panitia pelaksana kegiatan operasional pengendalian massa bulan April 2017;
5. Daftar honorarium panitia pelaksana kegiatan operasional pengendalian massa bulan Mei 2017;
6. Daftar honorarium panitia pelaksana kegiatan operasional pengendalian massa bulan Juni 2017;
7. Daftar honorarium panitia pelaksana kegiatan operasional pengendalian massa bulan Juli 2017;
8. Daftar honorarium panitia pelaksana kegiatan operasional pengendalian massa bulan Agustus 2017;
9. Daftar honorarium panitia pelaksana kegiatan operasional pengendalian massa bulan September 2017;
10. Daftar honorarium panitia pelaksana kegiatan operasional pengendalian massa bulan Oktober 2017;
11. Daftar honorarium panitia pelaksana kegiatan operasional pengendalian massa bulan November 2017;
12. Daftar honorarium panitia pelaksana kegiatan operasional pengendalian massa bulan Desember 2017;
13. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengendalian massa bulan Januari 2017 tertanggal 22 Februari 2017;
14. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengendalian massa bulan Februari 2017 tertanggal 22 Februari 2017;
15. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengendalian massa bulan Maret 2017 tertanggal..;
16. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengendalian massa bulan April 2017 tertanggal 13 April 2017;
17. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengendalian massa bulan Mei 2017 tertanggal 10 Mei 2017;

Halaman 7 dari 108 halaman Putusan Nomor 2350 K/Pid.Sus/2024

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengendalian massa bulan Juni 2017 tertanggal 14 Juni 2017;
19. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengendalian massa bulan Juli 2017 tertanggal 2 Agustus 2017;
20. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengendalian massa bulan Agustus 2017 tertanggal 2 Agustus 2017;
21. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengendalian massa bulan September 2017 tertanggal..;
22. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengendalian massa bulan Oktober 2017 tertanggal 6 Oktober 2017;
23. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengendalian massa bulan November 2017 tertanggal..;
24. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengendalian massa bulan Desember 2017 tertanggal 12 Desember 2017;

**Daftar Nominatif Tahun 2018;**

1. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengendalian massa bulan Januari 2018 tertanggal 15 Maret 2018;
2. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengendalian massa bulan Februari 2018 tertanggal 15 Maret 2018;
3. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengendalian massa bulan Maret 2018 tertanggal 15 Maret 2018;
4. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengendalian massa bulan April 2018 tertanggal 15 April 2018;
5. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengendalian massa bulan Mei 2018 tertanggal 31 Mei 2018;
6. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengendalian massa bulan Juni 2018 tertanggal 4 Juni 2018;
7. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengendalian massa bulan Juli 2018 tertanggal 24 Juli 2018;
8. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengendalian massa bulan Agustus 2018 tertanggal 21 Agustus 2018;

*Halaman 8 dari 108 halaman Putusan Nomor 2350 K/Pid.Sus/2024*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengendalian massa bulan September 2018 tertanggal 4 September 2018;
10. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengendalian massa bulan Oktober 2018 tertanggal 3 Agustus 2018;
11. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengendalian massa bulan November 2018 tertanggal 3 Agustus 2018;
12. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengendalian massa bulan Desember 2018 tertanggal 3 Agustus 2018;

Daftar Nominatif Tahun 2019;

1. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengendalian massa bulan Januari 2019 tertanggal 18 Januari 2019;
2. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengendalian massa bulan Februari 2019 tertanggal 18 Maret 2019;
3. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengendalian massa bulan Maret 2019 tertanggal 18 Maret 2019;
4. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengendalian massa bulan Maret 2019 tertanggal..;
5. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengendalian massa bulan April 2019 tertanggal 8 April 2019;
6. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengendalian massa bulan Mei 2019 tertanggal ;
7. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengendalian massa bulan Juni 2019 tertanggal 25 Juni 2019;
8. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengendalian massa bulan Juli 2019 tertanggal 24 Juli 2019;
9. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengendalian massa bulan Agustus 2019 tertanggal 6 Agustus 2019;
10. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengendalian massa bulan September 2019 tertanggal 5 September 2019;
11. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengendalian massa bulan Oktober 2019 tertanggal 7 Oktober 2019;



12. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengendalian massa bulan November 2019 tertanggal 11 November 2019;
13. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengendalian massa bulan Desember 2019 tertanggal 9 Desember 2019;

Daftar Nominatif Tahun 2020;

1. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengendalian massa bulan Januari 2020 tertanggal 10 Januari 2020;
2. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengendalian massa bulan Februari 2020 tertanggal 10 Februari 2020;
3. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengendalian massa bulan Maret 2020 tertanggal 17 Maret 2020;
4. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengendalian massa bulan April 2020 tertanggal 13 April 2020;
5. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengendalian massa bulan Mei 2020 tertanggal 6 Mei 2020;
6. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengendalian massa bulan Juni 2020 tertanggal 5 Juni 2020;
7. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengendalian massa bulan Juli 2020 tertanggal 23 Juli 2020;
8. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengendalian massa bulan Agustus 2020 tertanggal 28 Agustus 2020;
9. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengendalian massa bulan September 2020 tertanggal 22 September 2020;
10. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengendalian massa bulan Oktober 2020 tertanggal 23 Oktober 2020;
11. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengendalian massa bulan November 2020 tertanggal 24 November 2020;
12. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengendalian massa bulan Desember 2020 tertanggal 22 Desember 2020;

Patroli Kota;

1. DPA Tahun 2017;
2. DPA Tahun 2018;

*Halaman 10 dari 108 halaman Putusan Nomor 2350 K/Pid.Sus/2024*



3. DPA Tahun 2019;
4. DPA Tahun 2020;
- Daftar Nominatif Tahun 2017;
1. Daftar honorarium panitia pelaksana kegiatan operasional Patroli Kota bulan Januari 2017;
2. Daftar honorarium panitia pelaksana kegiatan operasional Patroli Kota bulan Februari 2017;
3. Daftar honorarium panitia pelaksana kegiatan operasional Patroli Kota bulan Maret 2017;
4. Daftar honorarium panitia pelaksana kegiatan operasional Patroli Kota bulan April 2017;
5. Daftar honorarium panitia pelaksana kegiatan operasional Patroli Kota bulan Mei 2017;
6. Daftar honorarium panitia pelaksana kegiatan operasional Patroli Kota bulan Juni 2017;
7. Daftar honorarium panitia pelaksana kegiatan operasional Patroli Kota bulan Juli 2017;
8. Daftar honorarium panitia pelaksana kegiatan operasional Patroli Kota bulan Agustus 2017;
9. Daftar honorarium panitia pelaksana kegiatan operasional Patroli Kota bulan September 2017;
10. Daftar honorarium panitia pelaksana kegiatan operasional Patroli Kota bulan Oktober 2017;
11. Daftar honorarium panitia pelaksana kegiatan operasional Patroli Kota bulan November 2017;
12. Daftar honorarium panitia pelaksana kegiatan operasional Patroli Kota bulan Desember 2017;
13. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan Patroli Kota bulan Januari 2017 tertanggal 22 Februari 2017;
14. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan Patroli Kota bulan Februari 2017 tertanggal 22 Februari 2017;

Halaman 11 dari 108 halaman Putusan Nomor 2350 K/Pid.Sus/2024



15. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan Patroli Kota bulan Maret 2017 tertanggal 22 Maret 2017;
  16. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan Patroli Kota bulan April 2017 tertanggal 13 April 2017;
  17. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan Patroli Kota bulan Mei 2017 tertanggal ;
  18. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan Patroli Kota bulan Juni 2017 tertanggal 2 Agustus 2017;
  19. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan Patroli Kota bulan Juli 2017 tertanggal 2 Agustus 2017;
  20. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan Patroli Kota bulan Agustus 2017 tertanggal 2 Agustus 2017;
  21. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan Patroli Kota bulan September 2017 tertanggal 6 September 2017;
  22. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan Patroli Kota bulan Oktober 2017 tertanggal 6 Oktober 2017;
  23. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan Patroli Kota bulan November 2017 tertanggal..;
  24. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan Patroli Kota bulan Desember 2017 tertanggal 12 Desember 2017;
- Daftar Nominatif Tahun 2018;
1. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan Patroli Kota bulan Januari 2018;
  2. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan Patroli Kota bulan Februari 2018;
  3. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan Patroli Kota bulan Maret 2018;
  4. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan Patroli Kota bulan April 2018;
  5. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan Patroli Kota bulan Mei 2018;

Halaman 12 dari 108 halaman Putusan Nomor 2350 K/Pid.Sus/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan Patroli Kota bulan Juni 2018;
7. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan Patroli Kota bulan Juli 2018;
8. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan Patroli Kota bulan Agustus 2018;
9. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan Patroli Kota bulan September 2018;
10. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan Patroli Kota bulan Oktober 2018;
11. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan Patroli Kota bulan November 2018;
12. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan Patroli Kota bulan Desember 2018;

## Daftar Nominatif Tahun 2019;

1. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan Patroli Kota Siaga Tibum bulan Januari 2019 tertanggal 18 Maret 2019;
2. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan Patroli Kota Siaga Tibum bulan Februari 2019 tertanggal 18 Maret 2019;
3. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan Patroli Kota Siaga Tibum bulan Maret 2019 tertanggal 18 Maret 2019;
4. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan Patroli Kota Siaga Tibum bulan April 2019 tertanggal 8 April 2019;
5. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan Patroli Kota Siaga Tibum bulan Mei 2019 tertanggal 17 Mei 2019;
6. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan Patroli Kota Siaga Tibum bulan Juni 2019 tertanggal 25 Juni 2019;
7. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan Patroli Kota Siaga Tibum bulan Juli 2019 tertanggal 24 Juli 2019;
8. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan Patroli Kota Siaga Tibum bulan Agustus 2019 tertanggal 6 Agustus 2019;

Halaman 13 dari 108 halaman Putusan Nomor 2350 K/Pid.Sus/2024



9. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan Patroli Kota Siaga Tibum bulan September 2019 tertanggal 5 September 2019;
10. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan Patroli Kota Siaga Tibum bulan Oktober 2019 tertanggal 7 Oktober 2019;
11. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan Patroli Kota Siaga Tibum bulan November 2019 tertanggal 11 November 2019;
12. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan Patroli Kota Siaga Tibum bulan Desember 2019 tertanggal..;

Daftar Nominatif Tahun 2020;

1. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pembinaan ketertiban, keamanan dan perlindungan masyarakat Sub Kegiatan Pengendalian Operasional Patroli Kota Siaga Tibum untuk bulan Januari 2020 tertanggal 14 Februari 2020;
2. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pembinaan ketertiban, keamanan dan perlindungan masyarakat Sub Kegiatan Pengendalian Operasional Patroli Kota Siaga Tibum untuk bulan Februari 2020 tertanggal 14 Februari 2020;
3. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pembinaan ketertiban, keamanan dan perlindungan masyarakat Sub Kegiatan Pengendalian Operasional Patroli Kota Siaga Tibum untuk bulan Maret 2020 tertanggal 17 Maret 2020;
4. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pembinaan ketertiban, keamanan dan perlindungan masyarakat Sub Kegiatan Pengendalian Operasional Patroli Kota Siaga Tibum untuk bulan April 2020 tertanggal 13 April 2020;
5. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pembinaan ketertiban, keamanan dan perlindungan masyarakat Sub Kegiatan Pengendalian Operasional Patroli Kota Siaga Tibum untuk bulan Mei 2020 tertanggal 6 Mei 2020;
6. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pembinaan ketertiban, keamanan dan perlindungan masyarakat Sub Kegiatan

Halaman 14 dari 108 halaman Putusan Nomor 2350 K/Pid.Sus/2024



Pengendalian Operasional Patroli Kota Siaga Tibum untuk bulan Juni 2020 tertanggal 4 Juni 2020;

7. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pembinaan ketertiban, keamanan dan perlindungan masyarakat Sub Kegiatan Pengendalian Operasional Patroli Kota Siaga Tibum untuk bulan Juli 2020 tertanggal 23 Juli 2020;
8. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pembinaan ketertiban, keamanan dan perlindungan masyarakat Sub Kegiatan Pengendalian Operasional Patroli Kota Siaga Tibum untuk bulan Agustus 2020 tertanggal 28 Agustus 2020;
9. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pembinaan ketertiban, keamanan dan perlindungan masyarakat Sub Kegiatan Pengendalian Operasional Patroli Kota Siaga Tibum untuk bulan September 2020 tertanggal 22 September 2020;
10. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pembinaan ketertiban, keamanan dan perlindungan masyarakat Sub Kegiatan Pengendalian Operasional Patroli Kota Siaga Tibum untuk bulan Oktober 2020 tertanggal 23 Oktober 2020;
11. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pembinaan ketertiban, keamanan dan perlindungan masyarakat Sub Kegiatan Pengendalian Operasional Patroli Kota Siaga Tibum untuk bulan November 2020 tertanggal 24 November 2020;
12. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pembinaan ketertiban, keamanan dan perlindungan masyarakat Sub Kegiatan Pengendalian Operasional Patroli Kota Siaga Tibum untuk bulan Desember 2020 tertanggal 22 Desember 2020;

Kecamatan Bontoala;

1. DPA Tahun 2017;
2. DPA Tahun 2018;
3. DPA Tahun 2019;
4. DPA Tahun 2020;
5. Surat Perintah Nomor 300/03.7/SP/I/2017 tertanggal 4 Januari 2017;

*Halaman 15 dari 108 halaman Putusan Nomor 2350 K/Pid.Sus/2024*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Surat Perintah Nomor 300/1.10/SP/I/2018 tertanggal 5 Januari 2018;
7. Surat Perintah Nomor 300/57.2/SP/IV/2018 tertanggal 2 April 2018
8. Surat Perintah Nomor 300/121.2/SP/V/2018 tertanggal 31 Mei 2018;
9. Surat Perintah Nomor 300/147/SP/VII/2018 tertanggal 17 Juli 2018;
10. Surat Perintah Nomor 300/31/SP/I/2019 tertanggal 10 Januari 2019;
11. Surat Perintah Nomor 423/300/SP/VII/2019 tertanggal 5 Juli 2019
12. Surat Perintah Nomor 014/300/SP/I/2020 tertanggal 2 Januari 2020;
13. Keputusan Camat Bontoala Nomor 057/S.KEP-KBTL/I/2017 tentang Pembentukan Panitia Tim Pengawasan dan Penanganan Ketertiban Wilayah Kecamatan Bontoala, Kota Makassar Tahun 2017 tertanggal 3 Januari 2017;
14. Keputusan Camat Bontoala Nomor 057/S.KEP-KBTL/I/2017 tentang Pembentukan Panitia Tim Pengawasan dan Penanganan Ketertiban Wilayah Kecamatan Bontoala, Kota Makassar Tahun 2017 tertanggal 5 Januari 2017;
15. Keputusan Camat Bontoala Nomor 900/054/SKEP-KBTL/I/2018 tentang Pembentukan Panitia Tim Pengawasan dan Penanganan Ketertiban Wilayah Kecamatan Bontoala, Kota Makassar Tahun 2018 tertanggal 3 Januari 2018;
16. Keputusan Camat Bontoala Nomor 730/054/SKEP-KBTL/I/2018 tentang Pembentukan Panitia Tim Pengawasan dan Penanganan Ketertiban Wilayah Kecamatan Bontoala, Kota Makassar Tahun 2018 tertanggal 8 Januari 2018;
17. Keputusan Camat Bontoala Nomor 730/193/SKEP-KBTL/VII/2018 tentang Perubahan Tim Pengawasan dan Penanganan Ketertiban Wilayah Kecamatan Bontoala, Kota Makassar Tahun 2018 tertanggal 17 Juli 2018;
18. Keputusan Camat Bontoala Nomor 730/02.42/SKEP-KBTL/I/2019 tentang Pembentukan Panitia Tim Pengawasan dan Penanganan Ketertiban Wilayah Kecamatan Bontoala, Kota Makassar Tahun 2019 tertanggal 3 Januari 2019;

Halaman 16 dari 108 halaman Putusan Nomor 2350 K/Pid.Sus/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Keputusan Camat Bontoala Nomor 730/029/SKEP-KBTL/I/2020 tentang Pembentukan Panitia Tim Pengawasan dan Penanganan Ketertiban Wilayah Kecamatan Bontoala, Kota Makassar Tahun 2020 tertanggal 2 Januari 2020;

Daftar Nominatif Tahun 2017;

1. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Januari sampai dengan bulan Februari 2017 tertanggal 28 Februari 2017;
2. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Maret 2017 tertanggal 31 Maret 2017;
3. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan April 2017 tertanggal 28 April 2017;
4. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Mei 2017 tertanggal 31 Mei 2017;
5. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Juni 2017 tertanggal 30 Juni 2017;
6. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Juli 2017 tertanggal 28 Juli 2017;
7. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Agustus 2017 tertanggal 31 Agustus 2017;
8. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan September 2017 tertanggal 30 September 2017;
9. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Oktober 2017 tertanggal 31 Oktober 2017;
10. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan November 2017 tertanggal 30 November 2017;
11. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Desember 2017 tertanggal 30 Desember 2017;

Daftar Nominatif Tahun 2018;

1. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Januari, Februari dan Maret 2018 tertanggal 31 Maret 2018;

*Halaman 17 dari 108 halaman Putusan Nomor 2350 K/Pid.Sus/2024*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan April 2018 tertanggal 30 April 2018;
3. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Mei 2018 tertanggal 15 Mei 2018;
4. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Juni 2018 tertanggal 29 Juni 2018;
5. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Juli 2018 tertanggal 31 Juli 2018;
6. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Agustus 2018 tertanggal 30 Agustus 2018;
7. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan September 2018 tertanggal 28 September 2018;
8. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Oktober 2018 tertanggal 30 September 2018;
9. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan November dan Desember 2018 tertanggal 28 Desember 2018;

### Daftar Nominatif Tahun 2019;

1. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Januari dan Februari 2019 tertanggal 6 Maret 2019;
2. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Maret 2019 tertanggal 29 Maret 2019;
3. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan April 2019 tertanggal 30 April 2019;
4. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Mei 2019 tertanggal 17 Mei 2019;
5. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Juni 2019 tertanggal 27 Juni 2019;
6. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Juli 2019 tertanggal 12 Juli 2019;

Halaman 18 dari 108 halaman Putusan Nomor 2350 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Agustus 2019 tertanggal 30 Agustus 2019;
8. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan September 2019 tertanggal 30 September 2019;
9. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Oktober 2019 tertanggal 31 Oktober 2019;
10. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan November 2019 tertanggal 29 November 2019;
11. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Desember 2019 tertanggal 31 Desember 2019;

**Daftar Nominatif Tahun 2020;**

1. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Januari dan Februari 2020 tertanggal 28 Februari 2020;
2. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Maret 2020 tertanggal 31 Maret 2020;
3. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan April 2020 tertanggal 30 April 2020;
4. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Mei 2020 tertanggal 29 Mei 2020;
5. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Juni 2020 tertanggal 30 Juni 2020;
6. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Juli 2020 tertanggal 30 Juli 2020;
7. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Agustus 2020 tertanggal 31 Agustus 2020;
8. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan September 2020 tertanggal 15 September 2020;
9. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Oktober 2020 tertanggal 30 Oktober 2020;
10. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan November 2020 tertanggal 30 November 2020;

*Halaman 19 dari 108 halaman Putusan Nomor 2350 K/Pid.Sus/2024*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Desember 2020 tertanggal 31 Desember 2020;  
Kecamatan Mangggala;
  1. DPA Tahun 2017;
  2. DPA Tahun 2018;
  3. DPA Tahun 2019;
  4. DPA Tahun 2020;
  5. Surat Perintah Nomor 300/03.3/SP/I/2017 tertanggal 4 Januari 2017;
  6. Surat Perintah Nomor 300/33.2/SP/III/2017 tertanggal 31 Maret 2017;
  7. Surat Perintah Nomor 300/78/SP/VII/2017 tertanggal 26 Juli 2017
  8. Surat Perintah Nomor 300/148.2/SP/XI/2017 tertanggal 8 November 2017;
  9. Surat Perintah Nomor 300/165.2/SP/XII/2017 tertanggal 8 Desember 2017;
  10. Surat Perintah Nomor 300/1.13/SP/I/2018 tertanggal 5 Januari 2018;
  11. Surat Perintah Nomor 300/21.e/SP/I/2019 tertanggal 4 Januari 2019;
  12. Surat Perintah Nomor 288.1/300/SP/V/2019 tertanggal 20 Mei 2019;
  13. Surat Perintah Nomor 01.14/300/SP/I/2020 tertanggal 2 Januari 2020;
  14. Keputusan Camat Manggala Nomor 014/S.KEP/KMGL/I/2017 tentang Penunjukan Panitia Pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan ketertiban Wilayah Kecamatan (Satpol-PP) Tingkat Kecamatan Manggala Tahun Anggaran 2017 tertanggal -- Januari 2017;
  15. Keputusan Camat Manggala Nomor 014.B/S.KEP/KMGL/VIII/2017 tentang Perubahan Penunjukan Panitia Pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan ketertiban Wilayah Kecamatan (Satpol-PP) Tingkat Kecamatan Manggala Tahun Anggaran 2017 tertanggal -- Agustus 2017;
  16. Keputusan Camat Manggala Nomor 012/S.KEP/KMGL/I/2018 tentang Penunjukan Panitia Pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan ketertiban Wilayah Kecamatan (Satpol-PP) Tingkat

Halaman 20 dari 108 halaman Putusan Nomor 2350 K/Pid.Sus/2024



Kecamatan Manggala Tahun Anggaran 2018 tertanggal 8 Januari 2018;

17. Keputusan Camat Manggala Nomor 013/S.KEP/KMGL/I/2020 tentang Penetapan Panitia Pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan ketertiban Wilayah Kecamatan Manggala Tahun Anggaran 2020 tertanggal 3 Januari 2020;

Daftar Nominatif Tahun 2017;

1. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Januari 2017 tertanggal 20 Februari 2017;
2. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Februari 2017 tertanggal 20 Maret 2017;
3. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Maret 2017 tertanggal 20 Maret 2017;
4. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan April 2017 tertanggal 28 April 2017;
5. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Mei 2017 tertanggal 5 Juni 2017;
6. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Juni 2017 tertanggal 9 Juni 2017;
7. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Juli 2017 tertanggal Juli 2017;
8. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Agustus 2017 tertanggal Agustus 2017;
9. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan September 2017 tertanggal September 2017;
10. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Oktober 2017 tertanggal Oktober 2017;
11. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan November 2017 tertanggal November 2017;
12. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Desember 2017 tertanggal Desember 2017;

Daftar Nominatif Tahun 2018;

*Halaman 21 dari 108 halaman Putusan Nomor 2350 K/Pid.Sus/2024*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Januari 2018 tertanggal 12 Maret 2018;
2. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Februari 2018 tertanggal 13 Maret 2018;
3. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Maret dan April 2018 tertanggal 1 April 2018;
4. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Mei 2018 tertanggal 20 Mei 2018;
5. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Juni 2018 tertanggal 8 Juni 2018;
6. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Juli 2018 tertanggal 3 Agustus 2018;
7. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Agustus 2018 tertanggal 28 Agustus 2018;
8. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan September 2018 tertanggal 20 September 2018;
9. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Oktober 2018 tertanggal 29 Oktober 2018;
10. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan November 2018 tertanggal 6 Desember 2018;
11. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Desember 2018 tertanggal 6 Desember 2018;

## Daftar Nominatif Tahun 2019;

1. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Januari sampai dengan bulan Februari 2019 tertanggal 4 Maret 2019;
2. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Maret 2019 tertanggal 20 Maret 2019;
3. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan April 2019 tertanggal 4 April 2019;
4. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Mei 2019 tertanggal 7 Mei 2019;

Halaman 22 dari 108 halaman Putusan Nomor 2350 K/Pid.Sus/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Juni 2019 tertanggal 13 Juni 2019;
6. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Juli 2019 tertanggal 10 Juli 2019;
7. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Agustus 2019 tertanggal 27 Agustus 2019;
8. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan September 2019 tertanggal 17 September 2019;
9. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Oktober 2019 tertanggal 21 Oktober 2019;
10. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan November 2019 tertanggal 13 November 2019;
11. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Desember 2019 tertanggal 6 Desember 2019;

## Daftar Nominatif Tahun 2020;

1. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2020 tertanggal 29 Mei 2020;
2. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan April sampai dengan bulan Juni 2020 tertanggal 25 Juni 2020;
3. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Juli 2020 tertanggal 15 Juli 2020;
4. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Agustus 2020 tertanggal 19 Agustus 2020;
5. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan September 2020 tertanggal 12 September 2020;
6. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Oktober 2020 tertanggal 12 Oktober 2020;
7. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan November 2020 tertanggal 10 November 2020;

Halaman 23 dari 108 halaman Putusan Nomor 2350 K/Pid.Sus/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Desember 2020 tertanggal 4 Desember 2020;

Kecamatan Tamalate;

1. DPA Tahun 2017;
2. DPA Tahun 2018;
3. DPA Tahun 2019;
4. DPA Tahun 2020;
5. Surat Perintah Nomor 300/03.13/SP/I/2017 tertanggal 4 Januari 2017;
6. Surat Perintah Nomor 300/36.1/SP/III/2017 tertanggal 31 Maret 2017;
7. Surat Perintah Nomor 300/1.15/SP/I/2018 tertanggal 5 Januari 2018;
8. Surat Perintah Nomor 300/121.1/SP/V/2018 tertanggal 31 Mei 2018;
9. Surat Perintah Nomor 300/215/SP/XI/2018 tertanggal 6 November 2018;
10. Surat Perintah Nomor 300/34.6/SP/I/2019 tertanggal 10 Januari 2019;
11. Surat Perintah Nomor 465/300/Sp/VII/2019 tertanggal 17 Juli 2019
12. Surat Perintah Nomor 01.12/300/SP/I/2020 tertanggal 3 Januari 2020;
13. Surat Perintah Nomor 53/300/SP/VI/2020 tertanggal 5 Juni 2020;

Daftar Nominatif Tahun 2017;

1. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Januari dan Februari 2017 tertanggal 1 Februari 2017;
2. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Maret 2017 tertanggal 27 Maret 2017;
3. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan April 2017 tertanggal 24 April 2017;
4. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Mei 2017 tertanggal 10 Mei 2017;
5. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Juni 2017 tertanggal 9 Juni 2017;
6. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Juli 2017 tertanggal 10 Juli 2017;

*Halaman 24 dari 108 halaman Putusan Nomor 2350 K/Pid.Sus/2024*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Agustus 2017 tertanggal 11 Agustus 2017;
8. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan September 2017 tertanggal 11 September 2017;
9. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Oktober 2017 tertanggal 10 Oktober 2017;
10. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan November 2017 tertanggal 1 November 2017;
11. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Desember 2017 tertanggal 1 Desember 2017;

## Daftar Nominatif Tahun 2018;

1. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2018 tertanggal 20 Februari 2018;
2. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan April 2018 tertanggal 19 April 2018;
3. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Mei 2018 tertanggal 18 Mei 2018;
4. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Juni 2018 tertanggal 4 Juni 2018;
5. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Juli 2018 tertanggal 13 Juli 2018;
6. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Agustus 2018 tertanggal 9 Agustus 2018;
7. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan September 2018 tertanggal 5 September 2018;
8. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Oktober 2018 tertanggal 4 Oktober 2018;
9. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan November 2018 tertanggal 1 November 2018;
10. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Desember 2018 tertanggal 1 Desember 2018;

Halaman 25 dari 108 halaman Putusan Nomor 2350 K/Pid.Sus/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Daftar Nominatif Tahun 2019;**

1. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Januari sampai dengan bulan Februari 2019 tertanggal 12 Maret 2019;
2. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Maret 2019 tertanggal 21 Maret 2019;
3. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan April 2019 tertanggal 9 April 2019;
4. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Mei 2019 tertanggal 7 Mei 2019;
5. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Juni 2019 tertanggal 14 Juni 2019;
6. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Juli 2019 tertanggal 8 Juli 2019;
7. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Agustus 2019 tertanggal 19 Agustus 2019;
8. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan September 2019 tertanggal 10 September 2019;
9. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Oktober 2019 tertanggal 16 Oktober 2019;
10. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan November 2019 tertanggal 7 November 2019;
11. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Desember 2019 tertanggal 18 November 2019;

**Daftar Nominatif Tahun 2020;**

1. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Januari 2020 tertanggal 27 Februari 2020;
2. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Februari 2020 tertanggal 27 Februari 2020;
3. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Maret 2020 tertanggal 18 Maret 2020;

*Halaman 26 dari 108 halaman Putusan Nomor 2350 K/Pid.Sus/2024*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan April 2020 tertanggal 27 April 2020;
5. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Mei 2020 tertanggal 8 Mei 2020;
6. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Juni 2020 tertanggal 3 Juni 2020;
7. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Juli 2020 tertanggal 6 Juli 2020;
8. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Agustus 2020 tertanggal 12 Agustus 2020;
9. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan September 2020 tertanggal 16 September 2020;
10. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Oktober 2020 tertanggal 6 Oktober 2020;
11. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan November 2020 tertanggal 4 November 2020;
12. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Desember 2020 tertanggal 4 November 2020;

## Kecamatan Biringkanaya;

1. DPA Tahun 2017;
2. DPA Tahun 2018;
3. DPA Tahun 2019;
4. DPA Tahun 2020;
5. Surat Perintah Nomor 004/300/SP/II/2018 tertanggal 3 Januari 2018;
6. Surat Perintah Nomor 309/300/SP/V/2019 tertanggal 24 Mei 2019;
7. Surat Perintah Nomor 335/300/SP/VI/2019 tertanggal 10 Juni 2019;
8. Surat Perintah Nomor 012/300/SP/II/2020 tertanggal 2 Januari 2020;
9. Keputusan Camat Biringkanaya Nomor 800/10/SK/KBRY/II/2017 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan ketertiban Wilayah (Satpol-PP) Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar Tahun Anggaran 2017 tertanggal 2 Januari 2017;

Halaman 27 dari 108 halaman Putusan Nomor 2350 K/Pid.Sus/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Keputusan Camat Biringkanaya Nomor 800/06a/SK/KBRY/II/2018 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan ketertiban Wilayah (Satpol-PP) Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar Tahun Anggaran 2018 tertanggal 2 Januari 2018;
11. Keputusan Camat Biringkanaya Nomor 800/66.A/SK/KBRY/VI/ 2018 tentang Perubahan Panitia Pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan ketertiban Wilayah (Satpol-PP) Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar Tahun Anggaran 2018 tertanggal 1 Juni 2018;
12. Keputusan Camat Biringkanaya Nomor 800/808/SK/KBRY/II/2019 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan ketertiban Wilayah (Satpol-PP) Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar Tahun Anggaran 2019 tertanggal 2 Januari 2019;
13. Keputusan Camat Biringkanaya Nomor 800/05/SK/KBRY/II/2020 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan ketertiban Wilayah (Satpol-PP) Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar Tahun Anggaran 2020 tertanggal 2 Januari 2020;

## Daftar Nominatif Tahun 2017;

1. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Januari dan Februari 2017 tertanggal 6 Februari 2017;
2. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Maret 2017 tertanggal 16 Maret 2017;
3. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan April 2017 tertanggal 4 April 2017;
4. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Mei 2017 tertanggal 10 Mei 2017;
5. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Juni 2017 tertanggal 10 Juni 2017;

Halaman 28 dari 108 halaman Putusan Nomor 2350 K/Pid.Sus/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Juli 2017 tertanggal 26 Juli 2017;
7. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Agustus 2017 tertanggal 7 Agustus 2017;
8. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan September 2017 tertanggal 27 September 2017;
9. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Oktober 2017 tertanggal 20 Oktober 2017;
10. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan November dan Desember 2017 tertanggal 10 Desember 2017;

### Daftar Nominatif Tahun 2018;

1. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Januari dan Februari 2018 tertanggal 30 Maret 2018;
2. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Maret 2018 tertanggal 20 Maret 2018;
3. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan April 2018 tertanggal 6 April 2018;
4. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Mei 2018 tertanggal 6 April 2018;
5. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Juni 2018 tertanggal 28 Mei 2018;
6. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Juli 2018 tertanggal 12 Juli 2018;
7. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Agustus 2018 tertanggal 28 Agustus 2018;
8. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan September 2018 tertanggal 6 September 2018;
9. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Oktober 2018 tertanggal 10 Oktober 2018;

Halaman 29 dari 108 halaman Putusan Nomor 2350 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan November 2018 tertanggal 14 November 2018;

11. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Desember 2018 tertanggal 13 Desember 2018;

Daftar Nominatif Tahun 2019;

1. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Januari dan Februari 2019 tertanggal...;

2. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Maret 2019 tertanggal...;

3. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan April 2019 tertanggal...;

4. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Mei 2019 tertanggal...;

5. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Juni 2019 tertanggal...;

6. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Juli 2019 tertanggal...;

7. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Agustus 2019 tertanggal...;

8. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan September 2019 tertanggal;

9. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Oktober 2019 tertanggal...;

10. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan November 2019 tertanggal...;

11. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Desember 2019 tertanggal...;

Daftar Nominatif Tahun 2020;

1. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Januari dan Februari 2020 tertanggal 14 Februari 2020;

Halaman 30 dari 108 halaman Putusan Nomor 2350 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Maret 2020 tertanggal 2 Maret 2020;
3. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan April 2020 tertanggal 1 April 2020;
4. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Mei 2020 tertanggal 1 Mei 2020;
5. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Juni 2020 tertanggal 1 Juni 2020;
6. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Juli 2020 tertanggal 1 Juli 2020;
7. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Agustus 2020 tertanggal 1 Agustus 2020;
8. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan September 2020 tertanggal 1 September 2020;
9. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Oktober 2020 tertanggal 1 Oktober 2020;
10. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan November 2020 tertanggal 2 November 2020;
11. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Desember 2020 tertanggal 1 Desember 2020;

Kecamatan Mariso;

1. DPA Tahun 2017;
2. DPA Tahun 2018;
3. DPA Tahun 2019;
4. DPA Tahun 2020;
5. Surat Perintah Nomor 900/051.3/SP/KMRS/I/2018 tertanggal Januari 2018;
6. Surat Perintah Nomor 900/051.4/SP/KMRS/VII/2018 tertanggal Juli 2018;
7. Surat Perintah Nomor 300/159/SP/VIII/2018 tertanggal 1 Agustus 2018;

*Halaman 31 dari 108 halaman Putusan Nomor 2350 K/Pid.Sus/2024*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Surat Perintah Nomor 900/051.5/SP/KMRS/VIII/2018 tertanggal Agustus 2018;
9. Surat Perintah Nomor 900/051.6/SP/KMRS/IX/2018 tertanggal September 2018;
10. Surat Perintah Nomor 300/24.2/SP/I/2019 tertanggal 9 Januari 2019;
11. Surat Perintah Nomor 0211/300/SP/I/2020 tertanggal 13 Januari 2020;
12. Surat perintah Nomor 02.1/300/SP/I/2020 tertanggal 13 Januari 2020;
13. Surat Perintah Nomor 800/19/SP/KMRS/I/2020 tertanggal 13 Januari 2020;
14. Surat Keputusan Camat Mariso Nomor 051/S.Kep/KMRS/I/2018, tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pengawasan dan Penanganan Ketertiban Wilayah Kecamatan Mariso Tahun Anggaran 2018 tertanggal Januari 2018;
15. Surat Keputusan Camat Mariso Nomor 036/S.kep/KMRS/I/2019, tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan dan Penanganan Ketertiban Wilayah Kecamatan Mariso Tahun Anggaran Tahun 2019 tertanggal Januari 2019;
16. Surat Keputusan Camat Mariso Nomor 036/S.kep/KMRS/I/2019, tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan dan Penanganan Ketertiban Wilayah Kecamatan Mariso Tahun Anggaran Tahun 2019 tertanggal 10 Januari 2019;
17. Surat Keputusan Camat Mariso Nomor 016/S.kep/KMRS/I/2020 tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan dan Penanganan Ketertiban Wilayah Kecamatan Mariso Tahun Anggaran Tahun 2020 tertanggal 2 Januari 2020;

Daftar Nominatif Tahun 2017;

1. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Januari 2017;
2. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Februari 2017;
3. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Maret 2017;

Halaman 32 dari 108 halaman Putusan Nomor 2350 K/Pid.Sus/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan April 2017;
5. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Mei 2017;
6. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Juni 2017 tertanggal Juni 2017;
7. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Juli 2017;
8. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Agustus 2017;
9. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan September 2017;
10. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Oktober 2017;
11. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan November 2017;
12. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Desember 2017;

## Daftar Nominatif Tahun 2018;

1. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Januari 2018 tertanggal 31 Januari 2018;
2. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Februari 2018;
3. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Maret 2018 tertanggal 31 Maret 2018;
4. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan April 2018 tertanggal 30 April 2018;
5. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Mei 2018 tertanggal 31 Mei 2018;
6. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Juni 2018 tertanggal 30 Juni 2017;

Halaman 33 dari 108 halaman Putusan Nomor 2350 K/Pid.Sus/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Juli 2018 tertanggal 31 Juli 2018;
8. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Agustus 2018 tertanggal 31 Agustus 2018;
9. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan September 2018 tertanggal 30 September 2018;
10. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Oktober 2018 tertanggal 31 Oktober 2018;
11. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan November 2018 tertanggal 30 November 2018;
12. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Desember 2018 tertanggal 31 Desember 2018;

**Daftar Nominatif Tahun 2019;**

1. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Januari 2019 tertanggal 31 Januari 2019;
2. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Februari 2019 tertanggal 28 Februari 2019;
3. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Maret 2019 tertanggal 31 Maret 2019;
4. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan April 2019 tertanggal 30 April 2019;
5. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Mei 2019 tertanggal 31 Mei 2019;
6. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Juni 2019 tertanggal 30 Juni 2019;
7. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Juli 2019 tertanggal 31 Juli 2019;
8. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Agustus 2019 tertanggal 31 Agustus 2019;
9. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan September 2019 tertanggal 30 September 2019;

*Halaman 34 dari 108 halaman Putusan Nomor 2350 K/Pid.Sus/2024*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Oktober 2019 tertanggal 31 Oktober 2019;
11. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan November 2019 tertanggal 30 November 2019;
12. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Desember 2019 tertanggal 31 Desember 2019;

### Daftar Nominatif Tahun 2020;

1. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Januari 2020 tertanggal 31 Januari 2020;
2. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Februari 2020 tertanggal 29 Februari 2020;
3. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Maret 2020 tertanggal 6 Maret 2020;
4. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan April 2020 tertanggal 1 April 2020;
5. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Mei 2020 tertanggal 28 April 2020;
6. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Juni 2020 tertanggal 3 Juni 2020;
7. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Juli 2020 tertanggal 1 Juli 2020;
8. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Agustus 2020 tertanggal 3 Agustus 2020;
9. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan September 2020 tertanggal 24 Agustus 2020;
10. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Oktober 2020 tertanggal 1 Oktober 2020;
11. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan November 2020 tertanggal 2 November 2020;
12. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Desember 2020 tertanggal 1 Desember 2020;

Kecamatan Panakukang;

Halaman 35 dari 108 halaman Putusan Nomor 2350 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. DPA Tahun 2017;
2. DPA Tahun 2018;
3. DPA Tahun 2019;
4. DPA Tahun 2020;
5. Surat Perintah 300/120/SP/IX/2017 tertanggal 18 September 2017
6. Surat Perintah Nomor 300/I.16/SP/I/2018 tertanggal 5 Januari 2018;
7. Surat Perintah Nomor 300/212/SP/X/2018 tertanggal 31 Oktober 2018;
8. Surat Perintah Nomor 300/32/SP/I/2019 tertanggal 10 Januari 2019;
9. Surat Perintah Nomor 11/300/SP/I/2020 tertanggal 8 Januari 2020
10. Keputusan Camat Panakkukang Nomor 330/43/S.KEP/KP/I/2017 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan ketertiban Wilayah Kecamatan Panakkukang Tahun Anggaran 2017 tertanggal 3 Januari 2017;
11. Keputusan Camat Panakkukang Nomor 330/93/S.KEP/KP/III/2017 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan ketertiban Wilayah Kecamatan Panakkukang Tahun Anggaran 2017 tertanggal 1 Maret 2017;
12. Keputusan Camat Panakkukang Nomor 330/199/S.KEP/KP/VI/2017 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan ketertiban Wilayah Kecamatan Panakkukang Tahun Anggaran 2017 tertanggal 1 Juni 2017;
13. Keputusan Camat Panakkukang Nomor 330/234/S.KEP/KP/VII/ 2017 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan ketertiban Wilayah Kecamatan Panakkukang Tahun Anggaran 2017 tertanggal 1 Juli 2017;
14. Keputusan Camat Panakkukang Nomor 330/288.b/S.KEP/KP/VIII/ 2017 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan ketertiban Wilayah Kecamatan Panakkukang Tahun Anggaran 2017 tertanggal 1 Agustus 2017;
15. Keputusan Camat Panakkukang Nomor 330/43/S.KEP/KP/I/2018 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana kegiatan pengawasan dan

Halaman 36 dari 108 halaman Putusan Nomor 2350 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengamanan ketertiban Wilayah Kecamatan Panakkukang Tahun Anggaran 2018 tertanggal 2 Januari 2018;

16. Keputusan Camat Panakkukang Nomor 330/42/S.KEP/KP/I/2019 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan ketertiban Wilayah Kecamatan Panakkukang Tahun Anggaran 2019 tertanggal 2 Januari 2019;

17. Keputusan Camat Panakkukang Nomor 330/26/S.KEP/KP/I/2020 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan ketertiban Wilayah Kecamatan Panakkukang Tahun Anggaran 2020 tertanggal 3 Januari 2020;

18. Keputusan Camat Panakkukang Nomor 330/63/S.KEP/KP/I/2020 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan ketertiban Wilayah Kecamatan Panakkukang Tahun Anggaran 2020 tertanggal 2 Maret 2020;

19. Keputusan Camat Panakkukang Nomor 330/26/S.KEP/KP/I/2020 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan ketertiban Wilayah Kecamatan Panakkukang Tahun Anggaran 2020 tertanggal 3 Januari 2020;

Daftar Nominatif Tahun 2017;

1. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Januari 2017 tertanggal 3 Januari 2017;

2. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Februari 2017 tertanggal 1 Februari 2017;

3. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Maret 2017 tertanggal 1 Maret 2017;

4. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan April 2017 tertanggal 1 April 2017;

5. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Mei 2017 tertanggal 1 Mei 2017;

6. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Juni 2017 tertanggal 1 Juni 2017;

Halaman 37 dari 108 halaman Putusan Nomor 2350 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Juli 2017 tertanggal 1 Juli 2017;
8. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Agustus 2017 tertanggal 14 Agustus 2017;
9. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan September 2017 tertanggal 1 September 2017;
10. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Oktober 2017 tertanggal 1 Oktober 2017;
11. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan November 2017 tertanggal 1 November 2017;
12. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Desember 2017 tertanggal 1 Desember 2017;

**Daftar Nominatif Tahun 2018;**

1. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Januari 2018 tertanggal 2 Januari 2018;
2. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Februari 2018 tertanggal 1 Februari 2018;
3. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Maret 2018 tertanggal 1 Maret 2018;
4. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan April 2018 tertanggal 1 April 2018;
5. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Mei 2018 tertanggal 1 Mei 2018;
6. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Juni 2018 tertanggal 1 Juni 2018;
7. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Juli 2018 tertanggal 1 Juli 2018;
8. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Agustus 2018 tertanggal 1 Agustus 2018;
9. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan September 2018 tertanggal 1 September 2018;

*Halaman 38 dari 108 halaman Putusan Nomor 2350 K/Pid.Sus/2024*



10. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Oktober 2018 tertanggal 1 Oktober 2018;
11. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan November 2018 tertanggal 1 November 2018;
12. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Desember 2018 tertanggal 1 Desember 2018;

**Daftar Nominatif Tahun 2019;**

1. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Januari 2019 tertanggal 2 Januari 2019;
2. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Februari 2019 tertanggal 2 Februari 2019;
3. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Maret 2019 tertanggal 1 Maret 2019;
4. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan April 2019 tertanggal 1 April 2019;
5. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Mei 2019 tertanggal 2 Mei 2019;
6. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Juni 2019 tertanggal 1 Juni 2019;
7. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Juli 2019 tertanggal 1 Juli 2019;
8. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Agustus 2019 tertanggal 1 Agustus 2019;
9. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan September 2019 tertanggal 2 September 2019;
10. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Oktober 2019 tertanggal 1 Oktober 2019;
11. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan November 2019 tertanggal 6 Desember 2019;
12. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Desember 2019 tertanggal 13 Desember 2019;

**Daftar Nominatif Tahun 2020;**

*Halaman 39 dari 108 halaman Putusan Nomor 2350 K/Pid.Sus/2024*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Januari 2020 tertanggal 10 Maret 2020;
2. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Februari 2020 tertanggal 10 Maret 2020;
3. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Maret 2020 tertanggal 1 Maret 2018;
4. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan April 2020 tertanggal 5 Mei 2020;
5. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Mei 2020 tertanggal 5 Mei 2020;
6. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Juni 2020 tertanggal 29 Juni 2020;
7. elanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Juli 2020 tertanggal 28 Juli2 2020;
8. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Agustus 2020 tertanggal 31 Agustus 2020;
9. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan September 2020 tertanggal 29 September 2020;
10. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Oktober 2020 tertanggal 28 November 2020;
11. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan November 2020 tertanggal 28 November 2020;
12. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Desember 2020 tertanggal 22 Desember 2020;

Kecamatan Tamalanrea;

1. DPA Tahun 2017;
2. DPA Tahun 2018;
3. DPA Tahun 2019;
4. DPA Tahun 2020;
5. Surat Perintah Nomor 300/10/SP/I/2017 tertanggal 2 Januari 2017;
6. Surat Perintah Nomor 006/300/SP/I/2017 tertanggal 4 Januari 2017;
7. Surat Perintah Nomor 300/12/SP/1/2018 tertanggal 16 Januari 2018;

Halaman 40 dari 108 halaman Putusan Nomor 2350 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Surat Perintah Nomor 300/121.3/SP/V/2018 tertanggal 31 Mei 2018;
9. Surat Perintah Nomor 300/188/SP/IX/2018 tertanggal 17 September 2018;
10. Surat Perintah Nomor 300/196/SP/IX/2018 tertanggal 27 September 2018;
11. Surat Perintah Nomor 300/21E/SP/I/2019 tertanggal 8 Januari 2019;
12. Surat Perintah Nomor 336/300/SP/VI/2019 tertanggal 10 Juni 2019;
13. Surat Perintah Nomor 424/300/SP/I/2020 tertanggal 10 Januari 2020;
14. Keputusan Camat Tamalanrea Nomor 011/300/S.KEP/KCT/I/2017; tentang Pembentukan Bantuan Kendali Operasi Bantuan Kendali Operasi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Tamalanrea Tahun Anggaran 2017 tertanggal 2 Januari 2017;
15. Keputusan Camat Tamalanrea Nomor 300/016/S.KEP/KCT/I/2018 tentang Pembentukan Panitia Pengawasan dan Penanganan Ketertiban Wilayah Kecamatan Tamalanrea Tahun Anggaran 2018 tertanggal 5 Januari 2018;
16. Keputusan Camat Tamalanrea Nomor 041.a/300/S.KEP/KCT/VII/2018 tentang Perubahan Pembentukan Panitia Pengawasan dan Penangan Ketertiban Wilayah Kecamatan Tamalanrea Tahun Anggaran 2018 tertanggal 2 Juli 2018;
17. Keputusan Camat Tamalanrea Nomor 061/300/S.KEP/KCT/IX/2018 tentang Perubahan Pembentukan Panitia Pengawasan dan Penangan Ketertiban Wilayah Kecamatan Tamalanrea Tahun Anggaran 2018 tertanggal 17 September 2018;
18. Keputusan Camat Tamalanrea Nomor 012.a/300/S.KEP/KCT/I/2019 tentang Pembentukan Bantuan Kendali Operasi Bantuan Kendali Operasi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Tamalanrea Tahun Anggaran 2019 tertanggal tertanggal 1 Januari 2019;
19. Keputusan Camat Tamalanrea Nomor 055/900/S.KEP/KCT/IX/2019 tentang Pembentukan Bantuan Kendali Operasi Bantuan Kendali Operasi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Tamalanrea Tahun Anggaran 2019 tertanggal 2 September 2019;

*Halaman 41 dari 108 halaman Putusan Nomor 2350 K/Pid.Sus/2024*



20. Keputusan Camat Tamalanrea Nomor 065/900/S.KEP/KCT/II/2010 tentang Pembentukan Bantuan Kendali Operasi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Tamalanrea Tahun Anggaran 2020 tertanggal 13 Januari 2020;

Daftar Nominatif Tahun 2017;

1. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Januari 2017;
2. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Februari 2017;
3. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Maret 2017;
4. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan April 2017 tertanggal 28 April 2017;
5. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Mei 2017 tertanggal 24 Mei 2017;
6. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Juni 2017 tertanggal 19 Juni 2017;
7. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Juli 2017 tertanggal 13 Juli 2017;
8. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Agustus 2017 tertanggal 29 Agustus 2017;
9. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan September 2017 tertanggal 12 September 2017;
10. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Oktober 2017 tertanggal 18 Oktober 2017;
11. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan November 2017 tertanggal 27 November 2017;
12. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Desember 2017 tertanggal 18 Desember 2017;

Daftar Nominatif Tahun 2018;



1. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Januari dan Februari 2018 tertanggal 12 Maret 2018;
2. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Maret 2018 tertanggal 28 Maret 2018;
3. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan April 2018 tertanggal 26 April 2018;
4. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Mei 2018 tertanggal 4 Juni 2018;
5. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Juni dan Juli 2018 tertanggal 6 Juli 2018;
6. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Agustus 2018 tertanggal 13 Agustus 2018;
7. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan September 2018 tertanggal 21 September 2018;
8. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Oktober 2018 tertanggal 24 Oktober 2018;
9. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan November 2018 tertanggal 26 November 2018;
10. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Desember 2018;

**Daftar Nominatif Tahun 2019;**

1. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Januari, Februari dan Maret 2019 tertanggal 21 Maret 2019;
2. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan April 2019 tertanggal 26 April 2019;
3. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Mei 2019 tertanggal 21 Mei 2019;
4. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Juni 2019 tertanggal 17 Juni 2019;

*Halaman 43 dari 108 halaman Putusan Nomor 2350 K/Pid.Sus/2024*



5. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Juli 2019 tertanggal 12 Juli 2019;
6. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Agustus 2019 tertanggal 12 Agustus 2019;
7. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan September 2019 tertanggal 6 September 2019;
8. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Oktober 2019 tertanggal 14 Oktober 2019;
9. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan November 2019 tertanggal 7 November 2019;
10. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Desember 2019 tertanggal 11 Desember 2019;

**Daftar Nominatif Tahun 2020;**

1. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Januari dan Februari 2020 tertanggal 27 Februari 2020;
2. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Maret 2020 tertanggal 16 Maret 2020;
3. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan April 2020 tertanggal 14 April 2020;
4. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Mei 2020 tertanggal 11 Mei 2020;
5. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Juni 2020 tertanggal 18 Juni 2020;
6. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Juli 2020 tertanggal 13 Juli 2020;
7. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Agustus 2020 tertanggal 10 Agustus 2020;
8. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan September 2020 tertanggal 2 September 2020;
9. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Oktober 2020 tertanggal 14 Oktober 2020;

*Halaman 44 dari 108 halaman Putusan Nomor 2350 K/Pid.Sus/2024*



10. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan November 2020;
11. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Desember 2020;

Kecamatan Rappocini;

1. DPA Tahun 2017;
2. DPA Tahun 2018;
3. DPA Tahun 2019;
4. DPA Tahun 2020;
5. Surat Perintah Nomor 300/04/SP/I/2017 tertanggal 9 Januari 2017;
6. Surat Perintah Nomor 300/121/SP/V/2018 tertanggal 31 Mei 2018;
7. Surat Perintah Nomor 300/39/SP/I/2019 tertanggal 15 Januari 2019;
8. Surat Perintah Nomor 324/300/SP/V/2019 tertanggal 29 Mei 2019;
9. Surat Perintah Nomor 369/300/Sp/VI/2019 tertanggal 20 Juni 2019;
10. Surat Perintah Nomor 01.1/300/SP/I/2020 tertanggal 2 Januari 2020;
11. Surat Perintah Nomor 37/300/SP/IV/2020 tertanggal 1 April 2020;
12. Surat Perintah Nomor 98/300/SP/X/2020 tertanggal 14 Oktober 2020;
13. Surat Keputusan Camat Rappocini Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pengawasan dan Penanganan Ketertiban Wilayah Pada Kecamatan Rappocini Tahun 2017 tertanggal 10 Januari 2017;
14. Surat Keputusan Camat Rappocini Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pengawasan dan Penanganan Ketertiban Wilayah Pada Kecamatan Rappocini Tahun 2018 tertanggal 2 Januari 2018;
15. Surat Keputusan Camat Rappocini Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pengawasan dan Penanganan Ketertiban Wilayah Pada Kecamatan Rappocini Tahun 2018 tertanggal 30 Juni 2018;
16. Surat Keputusan Camat Rappocini Nomor 01/730/Tahun 2019 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pengawasan dan

*Halaman 45 dari 108 halaman Putusan Nomor 2350 K/Pid.Sus/2024*



Penanganan Ketertiban Wilayah Pada Kecamatan Rappocini Tahun 2019 tertanggal 4 Januari 2019;

17. Surat Keputusan Camat Rappocini Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pengawasan dan Penanganan Ketertiban Wilayah Pada Kecamatan Rappocini Tahun 2020 tertanggal 2 Januari 2020;
18. Surat Keputusan Camat Rappocini Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penambahan dan Penggantian Panitia Pelaksana Kegiatan Pengawasan dan Penanganan Ketertiban Wilayah Pada Kecamatan Rappocini Tahun 2020 tertanggal 1 April 2020;
19. Surat Keputusan Camat Rappocini Nomor 34 Tahun 2020 tentang Penambahan dan Penggantian Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pengawasan dan Penanganan Ketertiban Wilayah Pada Kecamatan Rappocini Tahun 2020 tertanggal 1 Juli 2020;
20. Surat Keputusan Camat Rappocini Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penambahan dan Penggantian Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pengawasan dan Penanganan Ketertiban Wilayah Pada Kecamatan Rappocini Tahun 2020 tertanggal 7 September 2020;
21. Surat Keputusan Camat Rappocini Nomor 42 Tahun 2020 tentang Penggantian Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pengawasan dan Penanganan Ketertiban Wilayah Pada Kecamatan Rappocini Tahun 2020 tertanggal 2 November 2020;

Daftar Nominatif Tahun 2017;

1. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Januari 2017;
2. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Februari 2017;
3. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Maret 2017;
4. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan April 2017;

*Halaman 46 dari 108 halaman Putusan Nomor 2350 K/Pid.Sus/2024*



5. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Mei 2017;
6. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Juni 2017 tertanggal 22 Juni 2017;
7. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Juli 2017 tertanggal 31 Juli 2017;
8. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Agustus 2017 tertanggal 10 Agustus 2017;
9. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan September 2017 tertanggal 25 September 2017;
10. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Oktober 2017;
11. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan November 2017 tertanggal 27 Desember 2017;
12. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Desember 2017 tertanggal 27 Desember 2017;

**Daftar Nominatif Tahun 2018;**

1. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Januari dan Februari 2018;
2. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Maret 2018;
3. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan April 2018;
4. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Mei 2018;
5. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Juni 2018;
6. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Juli 2018;
7. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Agustus 2018;

*Halaman 47 dari 108 halaman Putusan Nomor 2350 K/Pid.Sus/2024*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan September 2018;
9. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Oktober 2018;
10. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan November 2018;
11. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Desember 2018;

## Daftar Nominatif Tahun 2019;

1. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Januari dan Februari 2019;
2. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Maret 2019;
3. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan April 2019;
4. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Mei 2019;
5. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Juni 2019;
6. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Juli 2019;
7. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Agustus 2019;
8. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan September 2019;
9. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Oktober 2019;
10. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan November 2019;
11. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Desember 2019 tertanggal 11 Desember 2019;

Halaman 48 dari 108 halaman Putusan Nomor 2350 K/Pid.Sus/2024



12. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Januari dan Februari 2020;
13. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Maret 2020;
14. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan April 2020;
15. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Mei 2020;
16. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Juni 2020;
17. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Juli 2020;
18. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Agustus 2020;
19. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan September 2020;
20. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Oktober 2020;
21. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan November 2020;
22. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Desember 2020;

Kecamatan Makassar;

1. DPA Tahun 2017;
2. DPA Tahun 2018;
3. DPA Tahun 2019;
4. DPA Tahun 2020;
5. Surat Perintah Nomor 300/162,4/SP/XII/2017 tertanggal 6 Desember Tahun 2017;
6. Surat Perintah Nomor 300/21.b/SP/I/2019 tertanggal 2 Januari Tahun 2019;

*Halaman 49 dari 108 halaman Putusan Nomor 2350 K/Pid.Sus/2024*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat perintah Nomor 300/33/SP/I/2019 bulan tertanggal 10 Januari Tahun 2019;
8. Surat Perintah Nomor 424/300/SP/VII/2019 tertanggal 5 Juli 2019;
9. Surat perintah Nomor 859/300/SP/XI/2019 tertanggal 4 November Tahun 2019;
10. Keputusan Camat Makassar Nomor 900/5/KEP/KMKS/I/2017 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan ketertiban Wilayah Kecamatan Makassar, Kota Makassar Tahun 2017 tertanggal 2 Januari 2017;
11. Keputusan Camat Makassar Nomor 900/54/KEP/KMKS/XII/2017 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan ketertiban Wilayah Kecamatan Makassar, Kota Makassar Tahun 2017 tertanggal 7 Desember 2017;

## Daftar Nominatif Tahun 2017;

1. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Januari 2017 tertanggal 16 Februari 2017;
2. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Februari 2017 tertanggal 16 Februari 2017;
3. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Maret 2017 tertanggal 24 Maret 2017;
4. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan April 2017 tertanggal 28 April 2017;
5. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Mei 2017 tertanggal 30 Mei 2017;
6. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Juni 2017 tertanggal 20 Juni 2017;
7. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Juli 2017 tertanggal 25 Juli 2017;
8. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Agustus 2017 tertanggal 25 Agustus 2017;
9. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan September 2017 tertanggal 29 September 2017;

Halaman 50 dari 108 halaman Putusan Nomor 2350 K/Pid.Sus/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Oktober 2017 tertanggal 27 Oktober 2017;
11. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan November 2017 tertanggal 24 November 2017;
12. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Desember 2017 tertanggal 15 Desember 2017;

### Daftar Nominatif Tahun 2018;

1. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Januari 2018 tertanggal 28 Maret 2018;
2. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Februari 2018 tertanggal 28 Maret 2018;
3. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Maret 2018 tertanggal 28 Maret 2018;
4. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan April 2018 tertanggal 24 April 2018;
5. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Mei 2018 tertanggal 31 Mei 2018;
6. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Juni 2018 tertanggal 4 Juni 2018;
7. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Juli 2018;
8. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Agustus 2018 tertanggal 14 Agustus 2018;
9. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan September 2018;
10. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Oktober 2018 tertanggal 26 Oktober 2018;
11. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan November 2018 tertanggal 6 Desember 2018;
12. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Desember 2018 tertanggal 6 Desember 2018;

### Daftar Nominatif Tahun 2019;

Halaman 51 dari 108 halaman Putusan Nomor 2350 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Januari 2019 tertanggal 12 Februari 2019;
2. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Februari 2019 tertanggal 5 Maret 2019;
3. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Maret 2019 tertanggal 13 Maret 2019;
4. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan April 2019 tertanggal 29 April 2019;
5. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Mei 2019 tertanggal 14 Mei 2019;
6. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Juni 2019 tertanggal 10 Juni 2019;
7. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Juli 2019 tertanggal 24 Juli 2019;
8. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Agustus 2019 tertanggal 13 Agustus 2019;
9. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan September 2019 tertanggal 19 September 2019;
10. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Oktober 2019 tertanggal 16 Oktober 2019;
11. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan November 2019 tertanggal 18 November 2019;
12. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Desember 2019 tertanggal 2 Desember 2019;

**Daftar Nominatif Tahun 2020;**

1. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Januari 2020 tertanggal 25 Februari 2020;
2. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Februari 2020 tertanggal 25 Februari 2020;
3. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Maret 2020 tertanggal 18 Maret 2020;

*Halaman 52 dari 108 halaman Putusan Nomor 2350 K/Pid.Sus/2024*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan April 2020 tertanggal 27 April 2020;
5. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Mei 2020 tertanggal 11 Mei 2020;
6. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Juni 2020 tertanggal 17 Juni 2020;
7. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Juli 2020 tertanggal 6 Juli 2020;
8. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Agustus 2020 tertanggal 18 Agustus 2020;
9. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan September 2020 tertanggal 2 September 2020;
10. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Oktober 2020 tertanggal 6 Oktober 2020;
11. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan November 2020 tertanggal 4 November 2020;
12. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Desember 2020 tertanggal 2 Desember 2020;

Kecamatan Ujung Pandang;

1. DPA Tahun 2017;
2. DPA Tahun 2018;
3. DPA Tahun 2019;
4. DPA Tahun 2020;
5. Surat Perintah Nomor 300/128/SP/IX/2017 tertanggal 28 September 2017;
6. Surat Perintah Nomor 300/37/SP/I/2019 tertanggal 3 Januari 2019;
7. Surat Perintah Nomor 46.b/300/SP/II/2019 tertanggal 1 Februari 2019;
8. Keputusan Camat Ujung Pandang Nomor 25.A/SK/KUP/I/2017 tentang Pembentukan Tenaga Pendukung Pelaksana Pengawasan dan Pengamanan Ketertiban Wilayah Kecamatan Pada OPD Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar Tahun Anggaran 2017 tertanggal 5 Januari 2017;

Halaman 53 dari 108 halaman Putusan Nomor 2350 K/Pid.Sus/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Keputusan Camat Ujung Pandang Nomor 61.A/SK/KUP/V/2017 tentang Perubahan Pertama Atas Surat Keputusan Camat Ujung Pandang Nomor 25.A/SK/KUP/I/2017 tanggal 5 Januari 2017 tentang Pembentukan Tenaga Pendukung Pelaksana Pengawasan dan Pengamanan Ketertiban Wilayah Kecamatan Pada OPD Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar Tahun Anggaran 2017 2 Mei 2017;
10. Keputusan Camat Ujung Pandang Nomor 67/SK/KUP/VII/2017 tentang Perubahan Pertama atas Surat Keputusan Camat Ujung Pandang Nomor 61.A/SK/KUP/V/2017 tanggal 2 Mei 2017 tentang Pembentukan Tenaga Pendukung Pelaksana Pengawasan dan Pengamanan Ketertiban Wilayah Kecamatan pada OPD Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar Tahun Anggaran 2017 3 Juli 2017;
11. Keputusan Camat Ujung Pandang Nomor 82.A/SK/KUP/X/2017 tentang Perubahan Pertama atas Surat Keputusan Camat Ujung Pandang Nomor 67/SK/KUP/VII/2017 tanggal 3 Juli 2017 tentang Pembentukan Tenaga Pendukung Pelaksana Pengawasan dan Pengamanan Ketertiban Wilayah Kecamatan pada OPD Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar Tahun Anggaran 2017 2 Oktober 2017;
12. Keputusan Camat Ujung Pandang Nomor 39/SK/KUP/I/2018 tentang Pembentukan Tenaga Pendukung Pelaksana Pengawasan dan Pengamanan Ketertiban Wilayah Kecamatan Pada OPD Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar Tahun Anggaran 2018 tertanggal 5 Januari 2018;
13. Keputusan Camat Ujung Pandang Nomor 46/SK/KUP/II/2018 tentang Perubahan Pertama atas Surat Keputusan Camat Ujung Pandang Nomor 39/SK/KUP/I/2018 tanggal 5 Januari 2018 tentang Pembentukan Tenaga Pendukung Pelaksana Pengawasan dan Pengamanan Ketertiban Wilayah Kecamatan pada OPD Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar Tahun Anggaran 2019 1 Februari 2019;

Halaman 54 dari 108 halaman Putusan Nomor 2350 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Keputusan Camat Ujung Pandang Nomor 67/SK/KUP/VI/2019 tentang Perubahan Pertama atas Surat Keputusan Camat Ujung Pandang Nomor 46/SK/KUP/II/2019 tanggal 1 Februari 2019 tentang Pembentukan Tenaga Pendukung Pelaksana Pengawasan dan Pengamanan Ketertiban Wilayah Kecamatan pada OPD Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar Tahun Anggaran 2019 1 Juni 2019;
15. Keputusan Camat Ujung Pandang Nomor 23/SK/KUP/I/2020 tentang Pembentukan Tenaga Pendukung Pelaksana Pengawasan dan Pengamanan Ketertiban Wilayah Kecamatan pada OPD Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar Tahun Anggaran 2020 6 Januari 2020;
16. Keputusan Camat Ujung Pandang Nomor 52/SK/KUP/X/2020 tentang Perubahan Pertama atas Surat Keputusan Camat Ujung Pandang Nomor 23/SK/KUP/VI/2019 tanggal 6 Januari 2020 tentang Pembentukan Tenaga Pendukung Pelaksana Pengawasan dan Pengamanan Ketertiban Wilayah Kecamatan pada OPD Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar Tahun Anggaran 2020 1 Oktober 2020;
17. Keputusan Camat Ujung Pandang Nomor 58/SK/KUP/XI/2020 tentang Perubahan Pertama Atas Surat Keputusan Camat Ujung Pandang Nomor 52/SK/KUP/X/2020 tanggal 1 Oktober 2020 tentang Pembentukan Tenaga Pendukung Pelaksana Pengawasan dan Pengamanan Ketertiban Wilayah Kecamatan pada OPD Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar Tahun Anggaran 2020 2 November 2020;

**Daftar Nominatif Tahun 2017;**

1. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Januari dan Februari 2017 tertanggal 7 Februari 2017;
2. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Maret 2017 tertanggal 20 Maret 2017;

*Halaman 55 dari 108 halaman Putusan Nomor 2350 K/Pid.Sus/2024*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan April 2017 tertanggal 3 April 2017;
4. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Mei 2017 tertanggal 13 Mei 2017;
5. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Juni 2017 tertanggal 5 Juni 2017;
6. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Juli 2017 tertanggal 3 Juli 2017;
7. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Agustus 2017 tertanggal 7 Agustus 2017;
8. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan September 2017 tertanggal 5 September 2017;
9. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Oktober 2017 tertanggal 9 Oktober 2017;
10. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan November 2017 tertanggal 6 November 2017;
11. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Desember 2017 tertanggal 8 Desember 2017;

**Daftar Nominatif Tahun 2018;**

1. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Januari 2018 tertanggal 14 Maret 2018;
2. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Februari 2018 tertanggal 27 Maret 2018;
3. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Maret 2018 tertanggal 27 Maret 2018;
4. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan April 2018 tertanggal 6 April 2018;
5. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Mei 2018 tertanggal 7 Mei 2018;
6. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Juni 2018 tertanggal 4 Juni 2018;

*Halaman 56 dari 108 halaman Putusan Nomor 2350 K/Pid.Sus/2024*



7. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Juli 2018 tertanggal 2 Juli 2018;
8. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Agustus 2018 tertanggal 6 Agustus 2018;
9. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan September 2018 tertanggal 3 September 2018;
10. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Oktober 2018 tertanggal 2 Oktober 2018;
11. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan November 2018 tertanggal 13 November 2018;
12. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Desember 2018 tertanggal 7 Desember 2018

**Daftar Nominatif Tahun 2019;**

1. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Januari 2019 tertanggal 8 Maret 2019;
2. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Februari dan Maret 2018 tertanggal 19 Maret 2019;
3. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan April 2019 tertanggal 15 April 2019;
4. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Mei 2019 tertanggal 6 Mei 2019;
5. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Juni 2019 tertanggal 14 Juni 2019;
6. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Juli 2019 tertanggal 1 Juli 2019;
7. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Agustus 2019 tertanggal 8 Agustus 2019;
8. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan September 2019 tertanggal 4 September 2019;
9. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Oktober 2019 tertanggal 2 Oktober 2019;

*Halaman 57 dari 108 halaman Putusan Nomor 2350 K/Pid.Sus/2024*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan November 2019 tertanggal 14 November 2019;
11. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Desember 2019 tertanggal 6 Desember 2019;

Daftar Nominatif Tahun 2020;

1. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Januari dan Februari 2019 tertanggal 25 Februari 2020;
2. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Maret 2020 tertanggal 10 Maret 2020;
3. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan April 2020 tertanggal 1 April 2020;
4. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Mei 2020 tertanggal 4 Mei 2020;
5. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Juni 2020 tertanggal 2 Juni 2020;
6. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Juli 2020 tertanggal 1 Juli 2020;
7. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Agustus 2020 tertanggal 3 Agustus 2020;
8. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan September 2020 tertanggal 1 September 2020;
9. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Oktober 2020 tertanggal 1 Oktober 2020;
10. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan November 2020 tertanggal 3 November 2020;
11. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Desember 2020 tertanggal 1 Desember 2020;

Kecamatan Tallo;

1. DPA Tahun 2017;
2. DPA Tahun 2018;
3. DPA Tahun 2019;

Halaman 58 dari 108 halaman Putusan Nomor 2350 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. DPA Tahun 2020;
5. Surat Perintah Nomor 423/300/SP/II/2020 tertanggal 8 Januari 2020;
6. Surat Perintah Nomor 33/300/SP/II/2020 tertanggal 27 Februari 2020;
7. Surat Keputusan Camat Tallo Kota Makassar Nomor 014/KEP/07/II/2017 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pengawasan dan Penanganan Ketertiban Wilayah Kecamatan bulan Januari sampai dengan bulan Maret SKPD Kecamatan Tallo tertanggal 3 Januari 2017;
8. Surat Keputusan Camat Tallo Kota Makassar Nomor 034.a/KEP/07/IV/2017 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pengawasan dan Penanganan Ketertiban Wilayah Kecamatan bulan April sampai dengan bulan Mei SKPD Kecamatan Tallo tertanggal 1 April 2017;
9. Surat Keputusan Camat Tallo Kota Makassar Nomor 042.a/KEP/07/VI/2017 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pengawasan dan Penanganan Ketertiban Wilayah Kecamatan bulan Juni SKPD Kecamatan Tallo tertanggal 1 Juni 2017;
10. Surat Keputusan Camat Tallo Kota Makassar Nomor 048.a/KEP/07/VII/2017 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pengawasan dan Penanganan Ketertiban Wilayah Kecamatan bulan Juli SKPD Kecamatan Tallo tertanggal 3 Juli 2017;
11. Surat Keputusan Camat Tallo Kota Makassar Nomor 0130/KEP/07/VIII/2017 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pengawasan dan Penanganan Ketertiban Wilayah Kecamatan bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober SKPD Kecamatan Tallo tertanggal 1 Agustus 2017;
12. Surat Keputusan Camat Tallo Kota Makassar Nomor 224/KEP/07/XI/2017 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pengawasan dan Penanganan Ketertiban Wilayah Kecamatan bulan November sampai dengan bulan Desember SKPD Kecamatan Tallo tertanggal 1 November 2017;
13. Surat Keputusan Camat Tallo Kota Makassar Nomor 013/KEP/07/II/2018 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan

Halaman 59 dari 108 halaman Putusan Nomor 2350 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawasan dan Penanganan Ketertiban Wilayah Kecamatan bulan Januari sampai dengan bulan Maret SKPD Kecamatan Tallo tertanggal 2 Januari 2018;

14. Surat Keputusan Camat Tallo Kota Makassar Nomor 087/KEP/07/IV/2018 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pengawasan dan Penanganan Ketertiban Wilayah Kecamatan bulan Juni sampai dengan bulan Agustus SKPD Kecamatan Tallo tertanggal 2 April 2018;
15. Surat Keputusan Camat Tallo Kota Makassar Nomor 130/KEP/07/IX/2018 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pengawasan dan Penanganan Ketertiban Wilayah Kecamatan bulan September SKPD Kecamatan Tallo tertanggal 3 September 2018;
16. Surat Keputusan Camat Tallo Kota Makassar Nomor 184.a/KEP/07/X/2018 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pengawasan dan Penanganan Ketertiban Wilayah Kecamatan bulan November SKPD Kecamatan Tallo tertanggal 1 November 2018;
17. Surat Keputusan Camat Tallo Kota Makassar Nomor 196/KEP/07/X/2018 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pengawasan dan Penanganan Ketertiban Wilayah Kecamatan bulan Desember SKPD Kecamatan Tallo tertanggal 1 Oktober 2018;
18. Surat Keputusan Camat Tallo Kota Makassar Nomor 017/KEP/07/I/2019 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pengawasan dan Penanganan Ketertiban Wilayah Kecamatan bulan Januari sampai dengan bulan April SKPD Kecamatan Tallo tertanggal 4 Januari 2019;
19. Surat Keputusan Camat Tallo Kota Makassar Nomor 034/KEP/07/VI/2019 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pengawasan dan Penanganan Ketertiban Wilayah Kecamatan bulan Mei SKPD Kecamatan Tallo tertanggal 1 Mei 2019;
20. Surat Keputusan Camat Tallo Kota Makassar Nomor 042/KEP/07/VI/2019 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pengawasan dan Penanganan Ketertiban Wilayah Kecamatan bulan

Halaman 60 dari 108 halaman Putusan Nomor 2350 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juni sampai dengan bulan Juli SKPD Kecamatan Tallo tertanggal 3 Juni 2019;

21. Surat Keputusan Camat Tallo Kota Makassar Nomor 057/KEP/07/VIII/2019 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pengawasan dan Penanganan Ketertiban Wilayah Kecamatan bulan Agustus SKPD Kecamatan Tallo tertanggal 1 Agustus 2019;
22. Surat Keputusan Camat Tallo Kota Makassar Nomor 057/KEP/07/VIII/2019 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pengawasan dan Penanganan Ketertiban Wilayah Kecamatan bulan Agustus SKPD Kecamatan Tallo tertanggal 1 Agustus 2019;
23. Surat Keputusan Camat Tallo Kota Makassar Nomor 002/KEP/07/II/2020 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pengawasan dan Penanganan Ketertiban Wilayah Kecamatan bulan Januari dan Februari SKPD Kecamatan Tallo tertanggal 2 Januari 2020;
24. Surat Keputusan Camat Tallo Kota Makassar Nomor 002.a/KEP/07/III/2020 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pengawasan dan Penanganan Ketertiban Wilayah Kecamatan bulan Maret sampai dengan bulan Desember SKPD Kecamatan Tallo tertanggal 2 Maret 2020;

Daftar Nominatif Tahun 2017;

1. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Januari Februari 2017 tertanggal 21 Februari 2017;
2. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Maret 2017 tertanggal 24 Maret 2017;
3. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan April 2017 tertanggal 28 Maret 2017;
4. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Mei 2017 tertanggal 22 Mei 2017;
5. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Juni 2017 tertanggal 20 Juni 2017;

*Halaman 61 dari 108 halaman Putusan Nomor 2350 K/Pid.Sus/2024*



6. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Juli 2017 tertanggal 26 Juli 2017;
7. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Agustus 2017 tertanggal 25 Agustus 2017;
8. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan September 2017 tertanggal 25 September 2017;
9. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Oktober 2017 tertanggal 26 Oktober 2017;
10. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan November 2017 tertanggal 13 Desember 2017;
11. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Desember 2017 tertanggal 15 Desember 2017;

**Daftar Nominatif Tahun 2018;**

1. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Januari dan Februari 2018 tertanggal 12 Maret 2018;
2. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Maret 2018 tertanggal 6 April 2018;
3. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan April 2018 tertanggal 7 Mei 2018;
4. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Mei 2018 tertanggal 28 Mei 2018;
5. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Juni 2018 tertanggal 6 Juli 2018;
6. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Juli 2018 tertanggal 30 Juli 2018;
7. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Agustus 2018 tertanggal 20 Agustus 2018;
8. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan September 2018 tertanggal 21 September 2018;
9. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Oktober 2018 tertanggal 23 Oktober 2018;

*Halaman 62 dari 108 halaman Putusan Nomor 2350 K/Pid.Sus/2024*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan November 2018;

11. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Desember 2018 tertanggal 12 Desember 2018;

Daftar Nominatif Tahun 2019;

1. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Januari dan Februari 2019 tertanggal 26 Februari 2019;

2. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Maret 2019 tertanggal 25 Maret 2019;

3. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan April 2019 tertanggal 25 April 2019;

4. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Mei 2019 tertanggal 24 Mei 2019;

5. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Juni 2019 tertanggal 24 Juni 2019;

6. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Juli 2019 tertanggal 23 Juli 2019;

7. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Agustus 2019 tertanggal 26 Agustus 2019;

8. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan September 2019 tertanggal 16 September 2019;

9. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Oktober 2019 tertanggal 15 Oktober 2019;

10. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan November 2019 tertanggal 21 November 2019;

11. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Desember 2019 tertanggal 11 Desember 2019;

12. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Februari 2019 tertanggal 26 Februari 2019;

Daftar Nominatif Tahun 2020;

Halaman 63 dari 108 halaman Putusan Nomor 2350 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Januari dan Februari 2020 tertanggal 2 Maret 2020;
2. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Maret 2019 tertanggal 23 Maret 2020;
3. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan April 2019 tertanggal 20 April 2020;
4. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Mei 2019 tertanggal 14 Mei 2020;
5. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Juni 2019 tertanggal 19 Juni 2020;
6. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Juli 2019 tertanggal 20 Juli 2020;
7. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Agustus 2019 tertanggal 19 Agustus 2020;
8. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan September 2019 tertanggal 15 September 2020;
9. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Oktober 2019 tertanggal 12 Oktober 2020;
10. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan November 2019 tertanggal 18 November 2020;
11. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Desember 2019 tertanggal 10 Desember 2020;

Kecamatan Ujung Tanah;

1. DPA Tahun 2017;
2. DPA Tahun 2018;
3. DPA Tahun 2019;
4. DPA Tahun 2020;
5. Surat Perintah Nomor 300/03.9/SP/I/2017 tertanggal 4 Januari 2017;
6. Surat Perintah Nomor 300/117/SP/IX/2017 tertanggal 14 September 2017;

Halaman 64 dari 108 halaman Putusan Nomor 2350 K/Pid.Sus/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat Perintah Nomor 998/300/SP/XII/2019 tertanggal 19 Desember 2019;
8. Surat Perintah Nomor 02.2/300/POL.PP/I/2020 tertanggal 14 Januari 2020;
9. Surat Perintah Nomor 74/300/SP/VII/2020 tertanggal 30 Juni 2020;
10. Surat Perintah Nomor 107/300/SP/XI/2020 tertanggal 2 November 2020;
11. Keputusan Camat Ujung Tanah Nomor 903/039/SK/KUT/I/2017 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana kegiatan pengawasan dan Pengamanan Ketertiban Wilayah Kecamatan Ujung Tanah Tahun Anggaran 2017 tertanggal 4 Januari 2017;
12. Keputusan Camat Ujung Tanah Nomor 903/048/SK/KUT/III/2017 tentang Revisi Surat Keputusan Camat Ujung Tanah Nomor 903/039/SK/KUT/I/2017 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pengawasan dan Pengamanan Ketertiban Wilayah Kecamatan Ujung Tanah Tahun Anggaran 2017 tertanggal 1 Maret 2017;
13. Keputusan Camat Ujung Tanah Nomor 903/048.1/SK/KUT/IV/2017 tentang Revisi Surat Keputusan Camat Ujung Tanah Nomor 903/048/SK/KUT/IV/2017 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pengawasan Dan Pengamanan Ketertiban Wilayah Kecamatan Ujung Tanah Tahun Anggaran 2017 tertanggal 3 April 2017;
14. Keputusan Camat Ujung Tanah Nomor 903/078/SK/KUT/VI/2017 tentang Revisi Surat Keputusan Camat Ujung Tanah Nomor 903/048/SK/KUT/III/2017 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pengawasan dan Pengamanan Ketertiban Wilayah Kecamatan Ujung Tanah Tahun Anggaran 2017 tertanggal 1 Juni 2017;
15. Keputusan Camat Ujung Tanah Nomor 903/039/SK/KUT/I/2018 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pengawasan dan

Halaman 65 dari 108 halaman Putusan Nomor 2350 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengamanan Ketertiban Wilayah Kecamatan Ujung Tanah Tahun Anggaran 2018 tertanggal 3 Januari 2018;

16. Keputusan Camat Ujung Tanah Nomor 903/056/SK/KUT/IV/2018 tentang Revisi Surat Keputusan Camat Ujung Tanah Nomor 903/039/SK/KUT/I/2018 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pengawasan dan Pengamanan Ketertiban Wilayah Kecamatan Ujung Tanah Tahun Anggaran 2018 tertanggal 2 April 2018;
17. Keputusan Camat Ujung Tanah Nomor 903/090/SK/KUT/VI/2018 tentang Revisi Surat Keputusan Camat Ujung Tanah Nomor 903/056/SK/KUT/IV/2018 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pengawasan dan Pengamanan Ketertiban Wilayah Kecamatan Ujung Tanah Tahun Anggaran 2018 tertanggal 11 Juni 2018;
18. Keputusan Camat Ujung Tanah Nomor 903/091/SK/KUT/VII/2018 tentang Revisi Surat Keputusan Camat Ujung Tanah Nomor 903/090/SK/KUT/VI/2018 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pengawasan dan Pengamanan Ketertiban Wilayah Kecamatan Ujung Tanah Tahun Anggaran 2018 tertanggal 2 Juli 2018;
19. Keputusan Camat Ujung Tanah Nomor 903/023/SK/KUT/I/2019 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pengawasan dan Pengamanan Ketertiban Wilayah Kecamatan Ujung Tanah Tahun Anggaran 2019 tertanggal 3 Januari 2019;
20. Keputusan Camat Ujung Tanah Nomor 903/060/SK/KUT/V/2019 tentang Revisi Surat Keputusan Camat Ujung Tanah Nomor 903/023/SK/KUT/I/2019 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pengawasan dan Pengamanan Ketertiban Wilayah Kecamatan Ujung Tanah Tahun Anggaran 2019 tertanggal 13 Mei 2019;
21. Keputusan Camat Ujung Tanah Nomor 903/090/SK/KUT/VIII/2019 tentang Revisi Surat Keputusan Camat Ujung Tanah Nomor

Halaman 66 dari 108 halaman Putusan Nomor 2350 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

903/060/SK/KUT/V/2019 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pengawasan dan Pengamanan Ketertiban Wilayah Kecamatan Ujung Tanah Tahun Anggaran 2019 tertanggal 1 Agustus 2019;

22. Keputusan Camat Ujung Tanah Nomor 903/115/SK/KUT/XI/2019 tentang Revisi Surat Keputusan Camat Ujung Tanah Nomor 903/099/SK/KUT/X/2019 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pengawasan dan Pengamanan Ketertiban Wilayah Kecamatan Ujung Tanah Tahun Anggaran 2018 tertanggal 1 November 2019;

23. Keputusan Camat Ujung Tanah Nomor 903/023/SK/KUT/II/2020 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pengawasan dan Pengamanan Ketertiban Wilayah Kecamatan Ujung Tanah Tahun Anggaran 2020 tertanggal 3 Januari 2020;

24. Keputusan Camat Ujung Tanah Nomor 903/060/SK/KUT/VI/2020 tentang Revisi Surat Keputusan Camat Ujung Tanah Nomor 903/055/SK/KUT/IV/2020 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pengawasan dan Pengamanan Ketertiban Wilayah Kecamatan Ujung Tanah Tahun Anggaran 2020 tertanggal 8 Juni 2020;

Daftar Nominatif Tahun 2017;

1. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Januari dan Februari 2017 tertanggal 15 Februari 2017;
2. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Maret 2017 tertanggal 20 Maret 2017;
3. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan April 2017 tertanggal 20 April 2017;
4. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Mei 2017 tertanggal 23 Mei 2017;
5. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Juni 2017 tertanggal 14 Juni 2017;

Halaman 67 dari 108 halaman Putusan Nomor 2350 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Juli 2017 tertanggal 19 Juli 2017;
7. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Agustus 2017 tertanggal 21 Agustus 2017;
8. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan September 2017 tertanggal 15 September 2017;
9. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Oktober 2017 tertanggal 25 Oktober 2017;
10. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan November 2017 tertanggal 10 November 2017;
11. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Desember 2017 tertanggal 9 Desember 2017;

**Daftar Nominatif Tahun 2018;**

1. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Januari dan Februari 2018 tertanggal 7 Maret 2018;
2. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Maret 2018 tertanggal 29 Maret 2018;
3. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan April 2018 tertanggal 23 April 2018;
4. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Mei 2018 tertanggal 30 Mei 2018;
5. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Juni 2018;
6. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Juli 2018 tertanggal 13 Juli 2018;
7. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Agustus 2018;
8. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan September 2018 tertanggal 26 September 2018;
9. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Oktober 2018 tertanggal 22 Oktober 2018;

*Halaman 68 dari 108 halaman Putusan Nomor 2350 K/Pid.Sus/2024*



10. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan November dan Desember 2018 tertanggal 11 Desember 2018;

Daftar Nominatif Tahun 2019;

1. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Januari 2019 tertanggal 15 Februari 2019;
2. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Februari 2019 tertanggal 12 Maret 2019;
3. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Maret 2019 tertanggal 30 Maret 2019;
4. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan April 2019 tertanggal 25 April 2019;
5. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Mei 2019 tertanggal 22 Mei 2019;
6. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Juni 2019 tertanggal 14 Juni 2019;
7. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Juli 2019 tertanggal 18 Juli 2019;
8. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Agustus 2019 tertanggal 27 Agustus 2019;
9. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan September 2019 tertanggal 24 September 2019;
10. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Oktober 2019 tertanggal 13 November 2019;
11. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan November 2019 tertanggal 13 November 2019;
12. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Desember 2019 tertanggal 9 Desember 2019;

Daftar Nominatif Tahun 2020;

1. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Januari dan Februari 2020 tertanggal 28 Februari 2020;

*Halaman 69 dari 108 halaman Putusan Nomor 2350 K/Pid.Sus/2024*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Maret 2020 tertanggal 23 Maret 2020;
3. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan April 2020 tertanggal 17 April 2020;
4. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Mei 2020 tertanggal 8 Mei 2020;
5. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Juni 2020 tertanggal 29 Mei 2020;
6. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Juli 2020 tertanggal 27 Juli 2020;
7. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Agustus 2020 tertanggal 18 Agustus 2020;
8. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan September 2020 tertanggal 25 September 2020;
9. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Oktober 2020 tertanggal 5 Oktober 2020;
10. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan November 2020 tertanggal 25 November 2020;
11. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Desember 2020 tertanggal 15 Desember 2020;

Kecamatan Mamajang;

1. DPA Tahun 2017;
2. DPA Tahun 2018;
3. DPA Tahun 2019;
4. DPA Tahun 2020;
5. Surat Perintah Nomor 300/29/SP/I/2019 tertanggal 10 Januari 2019;
6. Surat Perintah Nomor 014/300/SP/I/2020 tertanggal 3 Januari 2020;
7. Keputusan Camat Mamajang Nomor 100/19/S.KEP/KMJ/X/2018 tentang Pembentukan Panitia Pengawasan dan Pengamanan Ketertiban Wilayah Kecamatan Mamajang, Kota Makassar Tahun 2018 tertanggal 1 Oktober 2018;

Halaman 70 dari 108 halaman Putusan Nomor 2350 K/Pid.Sus/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Keputusan Camat Mamajang Nomor 100/09/S.KEP/KMJ/I/2019 tentang Pembentukan Panitia Pengawasan dan Pengamanan Ketertiban Wilayah Kecamatan Mamajang, Kota Makassar Tahun 2019 tertanggal 11 Januari 2019;
9. Keputusan Camat Mamajang Nomor 100/286/S.KEP/KMJ/IX/2019 tentang Pembentukan Panitia Pengawasan dan Pengamanan Ketertiban Wilayah Kecamatan Mamajang, Kota Makassar Tahun 2019 tertanggal 17 September 2019;

Daftar Nominatif Tahun 2017;

1. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Januari 2017 tertanggal 1 Januari 2017;
2. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Februari 2017 tertanggal 1 Februari 2017;
3. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Maret 2017 tertanggal 1 Maret 2017;
4. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan April 2017 tertanggal 3 April 2017;
5. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Mei 2017 tertanggal 1 Mei 2017;
6. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Juni 2017 tertanggal 1 Juni 2017;
7. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Juli 2017 tertanggal 1 Juli 2017;
8. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Agustus 2017 tertanggal 1 Agustus 2017;
9. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan September 2017 tertanggal 1 September 2017;
10. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Oktober 2017 tertanggal 1 Oktober 2017;
11. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan November 2017 tertanggal 1 November 2017;

*Halaman 71 dari 108 halaman Putusan Nomor 2350 K/Pid.Sus/2024*



12. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Desember 2017 tertanggal 1 Desember 2017;

Daftar Nominatif Tahun 2018;

1. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Januari 2018 tertanggal 1 Januari 2018;
2. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Februari 2018 tertanggal 1 Februari 2018;
3. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Maret 2018 tertanggal 1 Maret 2018;
4. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan April 2018 tertanggal 1 April 2018;
5. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Mei dan Juni 2018;
6. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Juli dan Agustus 2018 tertanggal 9 Agustus 2018;
7. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan September 2018;
8. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Oktober 2018 tertanggal 3 Oktober 2018;
9. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan November 2018;
10. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Desember 2018 tertanggal 29 November 2018;

Daftar Nominatif Tahun 2019;

1. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Januari 2019 tertanggal 11 Februari 2019;
2. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Februari 2019 tertanggal 19 Februari 2019;
3. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Maret 2019 tertanggal 14 Maret 2019;
4. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan April 2019 tertanggal 18 April 2019;

*Halaman 72 dari 108 halaman Putusan Nomor 2350 K/Pid.Sus/2024*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Mei 2019 tertanggal 22 Mei 2019;
6. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Juni 2019 tertanggal 25 Juni 2019;
7. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Juli 2019 tertanggal 15 Agustus 2019;
8. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Agustus 2019 tertanggal 2 September 2019;
9. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan September 2019 tertanggal 3 Oktober 2019;
10. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Oktober 2019 tertanggal 25 Oktober 2019;
11. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan November dan Desember 2019 tertanggal 2 Desember 2019;

### Daftar Nominatif Tahun 2020;

1. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Januari dan Februari 2020 tertanggal 24 Februari 2020;
2. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Maret 2020 tertanggal 7 April 2020;
3. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan April 2020 tertanggal 13 April 2020;
4. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Mei 2020 tertanggal 14 Mei 2020;
5. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Juni 2020 tertanggal 8 Juli 2020;
6. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Juli dan Agustus 2020 tertanggal 12 Agustus 2020;

Halaman 73 dari 108 halaman Putusan Nomor 2350 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan September dan Oktober 2020 tertanggal 22 Oktober 2020;
8. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan November 2020 tertanggal 4 November 2020;
9. Belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pengawasan dan pengamanan bulan Desember 2020 tertanggal 7 Desember 2020;

## Kecamatan Wajo;

1. DPA Tahun 2017;
2. DPA Tahun 2018;
3. DPA Tahun 2019;
4. DPA Tahun 2020;
5. Surat Perintah Nomor 300/03.10/SP/I/2017 tertanggal 4 Januari 2017;
6. Surat Perintah Nomor 40.a/300/POL-PP/I/2019 tertanggal 17 Januari 2019;
7. Surat Keputusan Camat Wajo Kota Makassar Nomor 19/KEP/KW/I/2017 tentang Kegiatan Pengawasan dan Pengamanan Ketertiban Wilayah Kecamatan Wajo Tahun 2017 tertanggal 9 Januari 2017;
8. Surat Keputusan Camat Wajo Kota Makassar Nomor 87/KEP/KW/VII/2017 tentang Kegiatan Pengawasan dan Pengamanan Ketertiban Wilayah Kecamatan Wajo Tahun 2017 tertanggal 31 Juli 2017;
9. Surat Keputusan Camat Wajo Kota Makassar Nomor 19/KEP/KW/I/2018 tentang Kegiatan Pengawasan dan Pengamanan Ketertiban Wilayah Kecamatan Wajo Tahun 2018 tertanggal 31 Januari 2018;
10. Surat Keputusan Camat Wajo Kota Makassar Nomor 73/KEP/KW/VI/2018 tentang Kegiatan Pengawasan dan Pengamanan Ketertiban Wilayah Kecamatan Wajo Tahun 2018 tertanggal 11 Juni 2018;
11. Surat Keputusan Camat Wajo Kota Makassar Nomor 19/KEP/KW/I/2019 tentang Kegiatan Pengawasan dan Pengamanan Ketertiban Wilayah Kecamatan Wajo Tahun 2019 tertanggal 31 Januari 2017;

Halaman 74 dari 108 halaman Putusan Nomor 2350 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Surat Keputusan Camat Wajo Kota Makassar Nomor 61/KEP/KW/V/2019 tentang Kegiatan Pengawasan dan Pengamanan Ketertiban Wilayah Kecamatan Wajo Tahun 2019 tertanggal 1 Mei 2019;
13. Surat Keputusan Camat Wajo Kota Makassar Nomor 09/KEP/KW/I/2020 tentang kegiatan pengawasan dan pengamanan ketertiban Wilayah Kecamatan Wajo Tahun 2020 tertanggal 6 Januari 2020;

## Daftar Nominatif Tahun 2017;

1. Belanja jasa tenaga pendukung kegiatan pengawasan dan pengamanan ketertiban Wilayah Kecamatan bulan Januari 2017 tertanggal 8 Februari 2017;
2. Belanja jasa tenaga pendukung kegiatan pengawasan dan pengamanan ketertiban Wilayah Kecamatan bulan Februari 2017 tertanggal 8 Februari 2017;
3. Belanja jasa tenaga pendukung kegiatan pengawasan dan pengamanan ketertiban Wilayah Kecamatan bulan Maret 2017 tertanggal 10 Maret 2017;
4. Belanja jasa tenaga pendukung kegiatan pengawasan dan pengamanan ketertiban Wilayah Kecamatan bulan April 2017 tertanggal 10 April 2017;
5. Belanja jasa tenaga pendukung kegiatan pengawasan dan pengamanan ketertiban Wilayah Kecamatan bulan Mei 2017 tertanggal 10 Mei 2017;
6. Belanja jasa tenaga pendukung kegiatan pengawasan dan pengamanan kegiatan Wilayah Kecamatan bulan Juni 2017 tertanggal 12 Juni 2017;
7. Belanja jasa tenaga pendukung kegiatan pengawasan dan pengamanan kegiatan Wilayah Kecamatan bulan Juli 2017 tertanggal 6 Juli 2017;
8. Belanja jasa tenaga pendukung kegiatan pengawasan dan pengamanan kegiatan Wilayah Kecamatan bulan Agustus 2017 tertanggal 7 Agustus 2017;

Halaman 75 dari 108 halaman Putusan Nomor 2350 K/Pid.Sus/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Belanja jasa tenaga pendukung kegiatan pengawasan dan pengamanan kegiatan Wilayah Kecamatan bulan September 2017 tertanggal 4 September 2017;
10. Belanja jasa tenaga pendukung kegiatan pengawasan dan pengamanan kegiatan Wilayah Kecamatan bulan Oktober 2017 tertanggal 9 Oktober 2017;
11. Belanja jasa tenaga pendukung kegiatan pengawasan dan pengamanan kegiatan Wilayah Kecamatan bulan November 2017 tertanggal 13 November 2017;
12. Belanja jasa tenaga pendukung kegiatan pengawasan dan pengamanan kegiatan Wilayah Kecamatan bulan Desember 2017 tertanggal 13 November 2017;

## Daftar Nominatif Tahun 2018;

1. Belanja jasa tenaga pendukung kegiatan pengawasan dan pengamanan ketertiban Wilayah Kecamatan bulan Januari 2018 tertanggal 31 Januari 2018;
2. Belanja jasa tenaga pendukung kegiatan pengawasan dan pengamanan ketertiban Wilayah Kecamatan bulan Februari 2018 tertanggal 28 Februari 2018;
3. Belanja jasa tenaga pendukung kegiatan pengawasan dan pengamanan ketertiban Wilayah Kecamatan bulan Maret 2018 tertanggal 5 Maret 2018;
4. Belanja jasa tenaga pendukung kegiatan pengawasan dan pengamanan ketertiban Wilayah Kecamatan bulan April 2018 tertanggal 16 April 2018;
5. Belanja jasa tenaga pendukung kegiatan pengawasan dan pengamanan ketertiban Wilayah Kecamatan bulan Mei 2018 tertanggal 11 Mei 2018;
6. Belanja jasa tenaga pendukung kegiatan pengawasan dan pengamanan ketertiban Wilayah Kecamatan bulan Juni 2018 tertanggal 4 Juni 2018;

Halaman 76 dari 108 halaman Putusan Nomor 2350 K/Pid.Sus/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Belanja jasa tenaga pendukung kegiatan pengawasan dan pengamanan ketertiban Wilayah Kecamatan Tingkat Kecamatan Wajo bulan Juli 2018 tertanggal 5 Juli 2018;
8. Belanja jasa tenaga pendukung kegiatan pengawasan dan pengamanan ketertiban Wilayah Kecamatan bulan Agustus 2018 tertanggal 6 Agustus 2018;
9. Belanja jasa tenaga pendukung kegiatan pengawasan dan pengamanan ketertiban Wilayah Kecamatan bulan September 2018 tertanggal 4 September 2018;
10. Belanja jasa tenaga pendukung kegiatan pengawasan dan pengamanan ketertiban Wilayah Kecamatan Tingkat Kecamatan Wajo bulan Oktober 2018 tertanggal 8 Oktober 2018;
11. Belanja jasa tenaga pendukung kegiatan pengawasan dan pengamanan ketertiban Wilayah Kecamatan Tingkat Kecamatan Wajo bulan November 2018 tertanggal 5 November 2018;
12. Belanja jasa tenaga pendukung kegiatan pengawasan dan pengamanan ketertiban Wilayah Kecamatan Tingkat Kecamatan Wajo bulan Desember 2018 tertanggal 3 Desember 2018;

## Daftar Nominatif Tahun 2019;

1. Belanja jasa tenaga pendukung kegiatan pengawasan dan pengamanan ketertiban Wilayah Kecamatan bulan Januari dan Februari 2019 tertanggal 27 Februari 2019;
2. Belanja jasa tenaga pendukung kegiatan pengawasan dan pengamanan ketertiban Wilayah Kecamatan bulan Maret 2019 tertanggal 3 Maret 2019;
3. Belanja jasa tenaga pendukung kegiatan pengawasan dan pengamanan ketertiban Wilayah Kecamatan bulan April 2019 tertanggal 8 April 2019;
4. Belanja jasa tenaga pendukung kegiatan pengawasan dan pengamanan ketertiban Wilayah Kecamatan bulan Mei 2019 tertanggal 6 Mei 2019;

Halaman 77 dari 108 halaman Putusan Nomor 2350 K/Pid.Sus/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Belanja jasa tenaga pendukung kegiatan pengawasan dan pengamanan ketertiban Wilayah Kecamatan bulan Juni 2019 tertanggal 12 Juni 2019;
6. Belanja jasa tenaga pendukung kegiatan pengawasan dan pengamanan ketertiban Wilayah Kecamatan bulan Juli 2019 tertanggal 8 Juli 2019;
7. Belanja jasa tenaga pendukung kegiatan pengawasan dan pengamanan ketertiban Wilayah Kecamatan bulan Agustus 2019 tertanggal 6 Agustus 2019;
8. Belanja jasa tenaga pendukung kegiatan pengawasan dan pengamanan ketertiban Wilayah Kecamatan bulan September 2019 tertanggal 2 September 2019;
9. Belanja jasa tenaga pendukung kegiatan pengawasan dan pengamanan ketertiban Wilayah Kecamatan bulan Oktober 2019 tertanggal 3 Oktober 2019;
10. Belanja jasa tenaga pendukung kegiatan pengawasan dan pengamanan ketertiban Wilayah Kecamatan bulan November 2019 tertanggal 4 November 2019;
11. Belanja jasa tenaga pendukung kegiatan pengawasan dan pengamanan ketertiban Wilayah Kecamatan bulan Desember 2019 tertanggal 6 Desember 2019;

### Daftar Nominatif Tahun 2020;

1. Honor Satpol PP kegiatan pengawasan dan pengamanan ketertiban Wilayah Kecamatan bulan Januari Tahun 2020 tertanggal 31 Januari 2020;
2. Honor Satpol PP kegiatan pengawasan dan pengamanan ketertiban Wilayah Kecamatan bulan Februari Tahun 2020 tertanggal 24 Februari 2020;
3. Honor Satpol PP kegiatan pengawasan dan pengamanan ketertiban Wilayah Kecamatan bulan Maret Tahun 2020 tertanggal 9 Maret 2020;

Halaman 78 dari 108 halaman Putusan Nomor 2350 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Honor Satpol PP kegiatan pengawasan dan pengamanan ketertiban Wilayah Kecamatan bulan April Tahun 2020 tertanggal 3 April 2020;
5. Honor Satpol PP kegiatan pengawasan dan pengamanan ketertiban Wilayah Kecamatan bulan Mei Tahun 2020 tertanggal 6 Mei 2020;
6. Honor Satpol PP kegiatan pengawasan dan pengamanan ketertiban Wilayah Kecamatan bulan Juni Tahun 2020 tertanggal 5 Juni 2020;
7. Honor Satpol PP kegiatan pengawasan dan pengamanan ketertiban Wilayah Kecamatan bulan Juli Tahun 2020 tertanggal 10 Juli 2020;
8. Honor Satpol PP kegiatan pengawasan dan pengamanan ketertiban Wilayah Kecamatan bulan Agustus Tahun 2020 tertanggal 10 Agustus 2020;
9. Honor Satpol PP kegiatan pengawasan dan pengamanan ketertiban Wilayah Kecamatan bulan September 2020 tertanggal 2 September 2020;
10. Honor Satpol PP kegiatan pengawasan dan pengamanan ketertiban Wilayah Kecamatan bulan Oktober 2020 tertanggal 5 Oktober 2020;
11. Honor Satpol PP kegiatan pengawasan dan pengamanan ketertiban Wilayah Kecamatan bulan November 2020 tertanggal 5 November 2020;
12. Honor Satpol PP kegiatan pengawasan dan pengamanan ketertiban Wilayah Kecamatan bulan Desember 2020 tertanggal 4 Desember 2020;
13. Rekening Koran Bank Sulselbar atas nama Syahrudin, Nomor Rekening 130-201-000045710-0;
14. Rekening Koran Bank Sulselbar atas nama Darwis, Nomor Rekening 130-201-000051400-6;
15. Rekening Koran Bank Sulselbar atas nama Ardiansyah, Nomor Rekening 130-201-000051078-7;
16. Rekening Koran Bank Sulselbar atas nama Abd. Latif, Nomor Rekening 130-201-000048307-1;
17. Rekening Koran Bank Sulselbar atas nama Sri Rika Elfira, Nomor Rekening 130-201-000051185-6;

Halaman 79 dari 108 halaman Putusan Nomor 2350 K/Pid.Sus/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Rekening Koran Bank Sulselbar atas nama Rudianto, Nomor Rekening 130-201-000051751-0;
19. Rekening Koran Bank Sulselbar atas nama Rizal Rifaldi, Nomor Rekening 130-201-00005177-0;
20. Rekening Koran Bank Sulselbar atas nama Jamaluddin, Nomor Rekening 130-201-000051508-8;
21. Rekening Koran Bank Sulselbar atas nama Rusman Setiadi, Nomor Rekening 130-201-000051301-8;
22. Rekening Koran Bank Sulselbar atas nama Muh. Adriansyah, Nomor Rekening 130-201-000048255-4;
23. Rekening Koran Bank Sulselbar atas nama Muhammad Nur Wahyudi, Nomor Rekening 139-201-000002627-4;
24. Rekening Koran Bank Sulselbar atas nama Humaira, Nomor Rekening 130-201-000048247-3;
25. Rekening Koran Bank Sulselbar atas nama Syahrul Ramadhana, Nomor Rekening 130-201-000052525-3;
26. Rekening Koran Bank Sulselbar atas nama Mardiah Makmur Djawaru, Nomor Rekening 130-201-000048325-9;
27. Rekening Koran Bank Sulselbar atas nama Muh. Nur Ilham Latif, Nomor Rekening 130-201-000051415-4;
28. Rekening Koran Bank Sulselbar atas nama Syahrudin, Nomor Rekening 130-201-000050740-9;
29. Rekening Koran Bank Sulselbar atas nama Muh. Rhiski Ramadan, Nomor Rekening 130-201-000051257-7;
30. Rekening Koran Bank Sulselbar atas nama Muh. Ansar Jumardi, Nomor Rekening 130-201-000052079-1;
31. Rekening Koran Bank Sulselbar atas nama Safri Eka Kadir, Nomor Rekening 130-201-000052547-4;
32. Rekening Koran Bank Sulselbar atas nama Muhammad Rijal, Nomor Rekening 130-201-000048383-6;
33. Rekening Koran Bank Sulselbar atas nama Hadryatno Arifuddin, Nomor Rekening 130-201-000048384-4;

Halaman 80 dari 108 halaman Putusan Nomor 2350 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Rekening Koran Bank Sulselbar atas nama Adzan Mualana, Nomor Rekening 130-201-000052039-1;
35. Rekening Koran Bank Sulselbar atas nama Andi Indri Astuti, Nomor Rekening 130-201-000052141-0;
36. Rekening Koran Bank Sulselbar atas nama Herry Sulaiman, Nomor Rekening 130-201-000051564-9;
37. Rekening Koran Bank Sulselbar atas nama Supriadi, Nomor Rekening 130-201-000051754-4;
38. Rekening Koran Bank Sulselbar atas nama Muhammad Ridwan, Nomor Rekening 130-201-000052082-1;
39. Rekening Koran Bank Sulselbar atas nama Andi Hendra Gunawan, Nomor Rekening 130-201-000051308-5;
40. Rekening Koran Bank Sulselbar atas nama Fadel Muhammad Baharuddin, Nomor Rekening 130-201-000052149-5;
41. Rekening Koran Bank Sulselbar atas nama Indarmawansyah Setiawan, Nomor Rekening 130-201-000054179-8;
42. Rekening Koran Bank Sulselbar atas nama Herianto, Nomor Rekening 130-201-000048378-0;
43. Rekening Koran Bank Sulselbar atas nama Indar Jaya, Nomor Rekening 130-201-000054192-5;
44. Rekening Koran Bank Sulselbar atas nama Bobi Budiawan Kombong, Nomor Rekening 130-201-000051312-3;
45. Rekening Koran Bank Sulselbar atas nama Mustakim, Nomor Rekening 130-201-000051172;
46. Rekening Koran Bank Sulselbar atas nama Handryatno Arifuddin, Nomor Rekening 130-201-000048384-4;
47. Rekening Koran Bank Sulselbar atas nama Yulia Febriani, Nomor Rekening 130-201-000055889-5;
48. Rekening Koran Bank Sulselbar atas nama Liliani Eka Putri, Nomor Rekening 130-201-000051769-2;
49. Rekening Koran Bank Sulselbar atas nama Jufri, Nomor Rekening 130-201-000048306-2;

Halaman 81 dari 108 halaman Putusan Nomor 2350 K/Pid.Sus/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Rekening Koran Bank Sulselbar atas nama Laode Dasri, Nomor Rekening 130-201-000045195-1;
51. Rekening Koran Bank Sulselbar atas nama Rahman, Nomor Rekening 130-201-000051757-9;
52. Rekening Koran Bank Sulselbar atas nama Ramdan Febryan, Hamdani Nomor Rekening 13-201-000051327-1;
53. Rekening Koran Bank Sulselbar atas nama Muhammad Saleh, Nomor Rekening 130-201-000030291-2;
54. Rekening Koran Bank Sulselbar atas nama Asriani, Nomor Rekening 130-201-000051776-5;
55. Rekening Koran Bank Sulselbar atas nama Akhmad Haddad, Nomor Rekening 130-201-000051484-7;
56. Rekening Koran Bank Sulselbar atas nama Andi Ilham D., Nomor Rekening 130-201-000052587-3;
57. Rekening Koran Bank Sulselbar atas nama Syaiful Alam, Nomor Rekening 130-201-000048365-8;
58. Rekening Koran Bank Sulselbar atas nama Imri Asis, Nomor Rekening 130-201-000051265-8;
59. Rekening Koran Bank Sulselbar atas nama Wahyudi AT., Nomor Rekening 130-201-000051170-8;
60. Rekening Koran Bank Sulselbar atas nama Audy Mastro, Nomor Rekening 130-201-000051079-5;
61. Rekening Koran Bank Sulselbar atas nama Burhanuddin Asri H., Nomor Rekening 130-201-000052416-8;
62. Rekening Koran Bank Sulselbar atas nama Dedi Kurniawan Nomor Rekening 130-201-00005301-0;
63. Rekening Koran Bank Sulselbar atas nama Edi Sudrajat, Nomor Rekening 130-201-00051268-2;
64. Rekening Koran Bank Sulselbar atas nama Zulkifli M., Nomor Rekening 130-201-000048370-4;
65. Rekening Koran Bank Sulselbar atas nama Ikbal, Nomor Rekening 130-201-000051698-0;

Halaman 82 dari 108 halaman Putusan Nomor 2350 K/Pid.Sus/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. Rekening Koran Bank Sulselbar atas nama Saharuddin T., Nomor Rekening 130-201-000051917-2;
67. Rekening Koran Bank Sulselbar atas nama Ilham H., Nomor Rekening 130-201-000048268-6;
68. Rekening Koran Bank Sulselbar atas nama Nikmatullah, Nomor Rekening 130-201-000051485-5;
69. Rekening Koran Bank Sulselbar atas nama Muh. Ilham, Nomor Rekening 130-201-000052086-3;
70. Rekening Koran Bank Sulselbar atas nama Rusli, Nomor Rekening 130-201-000051690-4;
71. Rekening Koran Bank Sulselbar atas nama Agung Tri Septiawan Syahrid, Nomor Rekening 1302010000516955;
72. Rekening Koran Bank Sulselbar atas nama Azwar Ali, Nomor Rekening 130-201-000051467-7;
73. Rekening Koran Bank Sulselbar atas nama Herman Kedong, Nomor Rekening 130-201-000051829-0
74. Rekening Koran Bank Sulselbar atas nama Thesar Yudi Malik, Nomor Rekening 130-201-000048385-2;
75. Rekening Koran Bank Sulselbar atas nama Sukiman, Nomor Rekening 130-201-000051914-8;
76. Rekening Koran Bank Sulselbar atas nama Capri Hidayat M., Nomor Rekening 130-201-000052006-5;
77. Rekening Koran Bank Sulselbar atas nama Ahmad Amiruddin, Nomor Rekening 130-201-000051258-5;
78. Rekening Koran Bank Sulselbar atas nama Hadrin Ansyari, Nomor Rekening 130-201-000051306-9;
79. Rekening Koran Bank Sulselbar atas nama Hasrul, S.E., Nomor Rekening 130-201-000048355-1;
80. Rekening Koran Bank Sulselbar atas nama Asrul, Nomor Rekening 130-201-000055218-8;
81. Rekening Koran Bank Sulselbar atas nama Henri, Nomor Rekening 130-201-000054193-3;

Halaman 83 dari 108 halaman Putusan Nomor 2350 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. Rekening Koran Bank Sulselbar atas nama Hafrin S.T., Kalok Nomor Rekening 130-201-000055865-8;
83. Rekening Koran Bank Sulselbar atas nama Muhammad Nur Iman Mapaita, S.E., Nomor Rekening 130-201-000052080-4;
84. Rekening Koran Bank Sulselbar atas nama La Ode Asri, Nomor Rekening 130-201-0000545195-1;
85. Rekening Koran Bank Sulselbar atas nama Dzul Ismail, Nomor Rekening 130-201-000049325-4;
86. Rekening Koran Bank Sulselbar atas nama Taufiq, Nomor Rekening 130-201-000043422-3;
87. Rekening Koran Bank Sulselbar atas nama Amal Ahmadi, Nomor Rekening 130-201-000048343-7;
88. Rekening Koran Bank Sulselbar atas nama Lukman Buang, Nomor Rekening 130-201-000048251-1;
89. Rekening Koran Bank Sulselbar atas nama Bakri Wahid, Nomor Rekening 130-201-000051503-7;
90. Rekening Koran Bank Sulselbar atas nama Halima, Nomor Rekening 130-201-000053003-6;
91. Rekening Koran Bank Sulselbar atas nama Yusran Nomor Rekening 130-201-000051072-8;
92. Rekening Koran Bank Sulselbar atas nama Wahyudi, Nomor Rekening 130-201-000051269-1;
93. Rekening Koran Bank Sulselbar atas nama Muhammad Anwar, Nomor Rekening 130-201-000051881-8;
94. Rekening Koran Bank Sulselbar atas nama Mustari, Nomor Rekening 130-201-000051325-5;
95. Rekening Koran Bank Sulselbar atas nama Ridwan Anton, Nomor Rekening 130-201-000052093-6;
96. Rekening Koran Bank Sulselbar atas nama Safri, Nomor Rekening 130-201-000051461-8;
97. Rekening Koran Bank Sulselbar atas nama Sahrir, Nomor Rekening 130-201-000052420-6;

Halaman 84 dari 108 halaman Putusan Nomor 2350 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. Rekening Koran Bank Sulselbar atas nama Haris, Nomor Rekening 130-201-000052106-1;
99. Rekening Koran Bank Sulselbar atas nama Arfina, Nomor Rekening 130-201-000051410-3;
100. Rekening Koran Bank Sulselbar atas nama M. Andri Pratama, Nomor Rekening 130-201-00001486-3;
101. Rekening Koran Bank Sulselbar atas nama Firdaus Firmanullah, Nomor Rekening 130-201-000048345-3;
102. Rekening Koran Bank Sulselbar atas nama Muhajir, Nomor Rekening 130-201-000052423-1;
103. Rekening Koran Bank Sulselbar atas nama Fatmawaty Rahim, Nomor Rekening 130-201-000051693-9;
104. Rekening Koran Bank Sulselbar atas nama Jusriadi, Nomor Rekening 130-201-000048348-8;
105. Rekening Koran Bank Sulselbar atas nama Megawati, Nomor Rekening 130-201-000048352-6;
106. Rekening Koran Bank Sulselbar atas nama Faisal Ramadhan Mustari, Nomor Rekening 130-201-000048266-0;

SP2D Tahun 2017;

Satpol PP;

1. SP2D Nomor 00158/SP2D/TU/II/2017 tanggal 16 Februari 2017;
2. SP2D Nomor 00987/SP2D/TU/III/2017 tanggal 17 Maret 2017;
3. SP2D Nomor 02241/SP2D/TU/IV/2017 tanggal 11 April 2017;
4. SP2D Nomor 03514/SP2D/TU/V/2017 tanggal 8 Mei 2017;
5. SP2D Nomor 05437/SP2D/TU/VI/2017 tanggal 9 Juni 2017;
6. SP2D Nomor 07610/SP2D/TU/VIII/2017 tanggal 31 Juli 2017;
7. SP2D Nomor 09813/SP2D/TU/IX/2017 tanggal 5 September 2017;
8. SP2D Nomor 11954/SP2D/TU/X/2017 tanggal 5 Oktober 2017;
9. SP2D Nomor 16551/SP2D/TU/XIII/2017 tanggal 4 Desember 2017;

Kecamatan Tallo;

1. SP2D Nomor 00125/SP2D/TU/II/2017 tanggal 13 Februari 2017;
2. SP2D Nomor 01207/SP2D/TU/III/2017 tanggal 17 Maret 2017;

Halaman 85 dari 108 halaman Putusan Nomor 2350 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SP2D Nomor 02934/SP2D/TU/IV/2017 tanggal 19 April 2017;
4. SP2D Nomor 03937/SP2D/TU/V/2017 tanggal 16 Mei 2017;
5. SP2D Nomor 07789/SP2D/TU/VIII/2017 tanggal 11 Juli 2017;
6. SP2D Nomor 09081/SP2D/TU/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017;
7. SP2D Nomor 11596/SP2D/TU/IX/2017 tanggal 25 September 2017;
8. SP2D Nomor 13492/SP2D/TU/IX/2017 tanggal 23 Oktober 2017;
9. SP2D Nomor 16244/SP2D/TU/XII/2017 tanggal 29 November 2017;

Kecamatan Tamalanrea;

1. SP2D Nomor 00762/SP2D/GU/III/2017 tanggal 2 Maret 2017;
2. SP2D Nomor 00853/SP2D/TU/III/2017 tanggal 13 Maret 2017;
3. SP2D Nomor 02933/SP2D/TU/IV/2017 tanggal 26 April 2017;
4. SP2D Nomor 09413/SP2D/TU/VIII/2017 tanggal 24 Agustus 2017;
5. SP2D Nomor 15664/SP2D/TU/XI/2017 tanggal 21 November 2017;

Kecamatan Ujung Tanah;

1. SP2D Nomor 00042/SP2D/TU/II/2017 tanggal 3 Februari 2017;
2. SP2D Nomor 02560/SP2D/TU/IV/2017 tanggal 17 April 2017;
3. SP2D Nomor 05707/SP2D/TU/VI/2017 tanggal 14 Juni 2017;
4. SP2D Nomor 06957/SP2D/TU/VII/2017 tanggal 18 Juli 2017;
5. SP2D Nomor 10421/SP2D/TU/IX/2017 tanggal 14 September 2017;
6. SP2D Nomor 16243/SP2D/TU/XII/2017 tanggal 30 November 2017;

Kecamatan Ujung Pandang;

1. SP2D Nomor 00022/SP2D/TU/II/2017 tanggal 1 Februari 2017;
2. SP2D Nomor 00310/SP2D/TU/III/2017 tanggal 27 Februari 2017;
3. SP2D Nomor 01226/SP2D/TU/III/2017 tanggal 27 Maret 2017;
4. SP2D Nomor 03004/SP2D/TU/IV/2017 tanggal 28 April 2017;
5. SP2D Nomor 07448/SP2D/TU/VII/2017 tanggal 26 Juli 2017;

Kecamatan Bontoala;

1. SP2D Nomor 00098/SP2D/TU/II/2017 tanggal 9 Februari 2017;
2. SP2D Nomor 01204/SP2D/TU/III/2017 tanggal 17 Maret 2017;
3. SP2D Nomor 02510/SP2D/TU/IV/2017 tanggal 17 April 2017;
4. SP2D Nomor 03868/SP2D/TU/V/2017 tanggal 17 Mei 2017;
5. SP2D Nomor 07233/SP2D/TU/VII/2017 tanggal 25 Juli 2017;

Halaman 86 dari 108 halaman Putusan Nomor 2350 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. SP2D Nomor 09309/SP2D/TU/VIII/2017 tanggal 24 Agustus 2017;
7. SP2D Nomor 10902/SP2D/TU/IX/2017 tanggal 22 September 2017;
8. SP2D Nomor 15629/SP2D/TU/XI/2017 tanggal 22 November 2017;
9. SP2D Nomor 16229/SP2D/TU/XII/2017 tanggal 4 Desember 2017;

Kecamatan Tamalate;

1. SP2D Nomor 00159/SP2D/TU/II/2017 tanggal 17 Februari 2017;
2. SP2D Nomor 01417/SP2D/TU/III/2017 tanggal 27 Maret 2017;
3. SP2D Nomor 02987/SP2D/TU/IV/2017 tanggal 26 April 2017;
4. SP2D Nomor 04220/SP2D/TU/V/2017 tanggal 24 Mei 2017;
5. SP2D Nomor 07058/SP2D/TU/VII/2017 tanggal 21 Juli 2017;
6. SP2D Nomor 17631/SP2D/TU/XII/2017 tanggal 28 November 2017;

Kecamatan Manggala;

1. SP2D Nomor 00624/SP2D/TU/III/2017 tanggal 10 Maret 2017;
2. SP2D Nomor 02591/SP2D/TU/IV/2017 tanggal 18 April 2017;
3. SP2D Nomor 04050/SP2D/TU/V/2017 tanggal 17 Mei 2017;
4. SP2D Nomor 08477/SP2D/TU/VIII/2017 tanggal 10 Agustus 2017;
5. SP2D Nomor 11089/SP2D/TU/IX/2017 tanggal 22 September 2017;
6. SP2D Nomor 12671/SP2D/GU/X/2017 tanggal 13 Oktober 2017;
7. SP2D Nomor 16549/SP2D/TU/XII/2017 tanggal 30 November 2017;

Kecamatan Biringkanaya;

1. SP2D Nomor 00039/SP2D/TU/II/2017 tanggal 6 Februari 2017;
2. SP2D Nomor 00904/SP2D/TU/III/2017 tanggal 15 Maret 2017;
3. SP2D Nomor 02146/SP2D/TU/IV/2017 tanggal 11 April 2017;
4. SP2D Nomor 03767/SP2D/TU/V/2017 tanggal 15 Mei 2017;
5. SP2D Nomor 07189/SP2D/TU/VII/2017 tanggal 21 Juli 2017;
6. SP2D Nomor 08084/SP2D/TU/VIII/2017 tanggal 3 Agustus 2017;
7. SP2D Nomor 11394/SP2D/TU/IX/2017 tanggal 25 September 2017;
8. SP2D Nomor 16928/SP2D/TU/XII/2017 tanggal 30 November 2017;

Kecamatan Mamajang;

1. SP2D Nomor 00059/SP2D/TU/II/2017 tanggal 8 Februari 2017;
2. SP2D Nomor 01527/SP2D/TU/IV/2017 tanggal 3 April 2017;
3. SP2D Nomor 04430/SP2D/TU/V/2017 tanggal 17 Mei 2017;

*Halaman 87 dari 108 halaman Putusan Nomor 2350 K/Pid.Sus/2024*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. SP2D Nomor 07228/SP2D/TU/VII/2017 tanggal 20 Juli 2017;
  5. SP2D Nomor 08729/SP2D/TU/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017;
  6. SP2D Nomor 16246/SP2D/TU/XII/2017 tanggal 28 November 2017;
- Kecamatan Wajo;
1. SP2D Nomor 03000/SP2D/TU/IV/2017 tanggal 28 April 2017;
- Kecamatan Mariso;
1. SP2D Nomor 00059/SP2D/TU/II/2017 tanggal 6 Februari 2017;
  2. SP2D Nomor 00760/SP2D/TU/III/2017 tanggal 13 Maret 2017
  3. SP2D Nomor 02210/SP2D/TU/IV/2017 tanggal 11 April 2017;
  4. SP2D Nomor 03660/SP2D/TU/V/2017 tanggal 9 Mei 2017;
  5. SP2D Nomor 06811/SP2D/TU/VII/2017 tanggal 14 Juli 2017;
  6. SP2D Nomor 12874/SP2D/TU/X/2017 tanggal 17 Oktober 2017;
  7. SP2D Nomor 17786/SP2D/TU/XII/2017 tanggal 4 Desember 2017;
- Kecamatan Makassar;
1. SP2D Nomor 00054/SP2D/TU/II/2017 tanggal 7 Februari 2017;
  2. SP2D Nomor 01033/SP2D/TU/III/2017 tanggal 16 Maret 2017;
  3. SP2D Nomor 04373/SP2D/TU/V/2017 tanggal 24 Mei 2017;
  4. SP2D Nomor 05798/SP2D/TU/VI/2017 tanggal 15 Juni 2017;
  5. SP2D Nomor 09125/SP2D/TU/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017;
  6. SP2D Nomor 16764/SP2D/TU/XII/2017 tanggal 4 Desember 2017;
- Kecamatan Panakukang;
1. SP2D Nomor 00031/SP2D/TU/II/2017 tanggal 2 Februari 2017;
  2. SP2D Nomor 01165/SP2D/TU/III/2017 tanggal 20 Maret 2017;
  3. SP2D Nomor 04179/SP2D/TU/V/2017 tanggal 18 Mei 2017;
  4. SP2D Nomor 05674/SP2D/TU/VI/2017 tanggal 13 Juni 2017;
  5. SP2D Nomor 06802/SP2D/TU/VII/2017 tanggal 13 Juli 2017;
  6. SP2D Nomor 09412/SP2D/TU/VIII/2017 tanggal 25 Agustus 2017;
  7. SP2D Nomor 13587/SP2D/TU/X/2017 tanggal 25 Oktober 2017;
  8. SP2D Nomor 15712/SP2D/TU/XI/2017 tanggal 22 November 2017;
  9. SP2D Nomor 17043/SP2D/TU/XII/2017 tanggal 4 Desember 2017;
- Kecamatan Rappocini;
1. SP2D Nomor 00083/SP2D/TU/II/2017 tanggal 10 Februari 2017;

Halaman 88 dari 108 halaman Putusan Nomor 2350 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SP2D Nomor 00960/SP2D/TU/III/2017 tanggal 15 Maret 2017;
3. SP2D Nomor 02230/SP2D/TU/IV/2017 tanggal 11 April 2017;
4. SP2D Nomor 03138/SP2D/TU/V/2017 tanggal 2 Mei 2017;
5. SP2D Nomor 05414/SP2D/TU/VI/2017 tanggal 12 Juni 2017;
6. SP2D Nomor 06920/SP2D/TU/VII/2017 tanggal 17 Juli 2017;
7. SP2D Nomor 08513/SP2D/TU/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017;
8. SP2D Nomor 10592/SP2D/TU/IX/2017 tanggal 14 September 2017;
9. SP2D Nomor 17597/SP2D/TU/XII/2017 tanggal 4 Desember 2017;

Tahun 2018;

Kecamatan Ujung Pandang;

1. SP2D Nomor 00228/SP2D/GU/III/2018 tanggal 21 Maret 2018;
2. SP2D Nomor 01213/SP2D/GU/IV/2018 tanggal 20 April 2018;
3. SP2D Nomor 03776/SP2D/GU/VI/2018 tanggal 6 Juni 2018;
4. SP2D Nomor 04369/SP2D/GU/VII/2018 tanggal 9 Juli 2018;
5. SP2D Nomor 05221/SP2D/GU/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018;
6. SP2D Nomor 07736/SP2D/GU/IX/2018 tanggal 7 September 2018;
7. SP2D Nomor 06745/SP2D/GU/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018;
8. SP2D Nomor 09813/SP2D/GU/XI/2018 tanggal 9 Oktober 2018;
9. SP2D Nomor 10411/SP2D/GU/X/2018 tanggal 19 Oktober 2018;
10. SP2D Nomor 11332/SP2D/GU/XI/2018 tanggal 5 November 2018;
11. SP2D Nomor 12349/SP2D/GU/2018 tanggal 30 November 2018;
12. SP2D Nomor 12572/SP2D/TU/XII/2018 tanggal 3 Desember 2018;

Kecamatan Panakukang;

1. SP2D Nomor 01515/SP2D/GU/V/2018 tanggal 30 April 2018;
2. SP2D Nomor 02821/SP2D/TU/V/2018 tanggal 30 Mei 2018
3. SP2D Nomor 06543/SP2D/GU/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018;
4. SP2D Nomor 08305/SP2D/GU/IX/2018 tanggal 12 September 2018;
5. SP2D Nomor 09982/SP2D/GU/X/2018 tanggal 12 Oktober 2018;
6. SP2D Nomor 12014/SP2D/GU/XI/2018 tanggal 21 November 2018;
7. SP2D Nomor 102423/SP2D/TU/XII/2018 tanggal 3 Desember 2018;

Kecamatan Tamalate;

1. SP2D Nomor 00443/SP2D/GU/IV/2018;

Halaman 89 dari 108 halaman Putusan Nomor 2350 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SP2D Nomor 04334/SP2D/GU/VII/2018;
3. SP2D Nomor 05179/SP2D/GU/VII/2018;
4. SP2D Nomor 08736/SP2D/GU/IX/2018;
5. SP2D Nomor 09583/SP2D/GU/X/2018;
6. SP2D Nomor 12386/SP2D/GU/XII/2018;
7. SP2D Nomor 12666/SP2D/TU/XII/2018;

Kecamatan Bontoala;

1. SP2D Nomor 00474/SP2D/GU/IV/2018;
2. SP2D Nomor 01613/SP2D/GU/V/2018;
3. SP2D Nomor 02887/SP2D/GU/VI/2018;
4. SP2D Nomor 00474/SP2D/GU/IV/2018;
5. SP2D Nomor 05220/SP2D/GU/VII/2018;
6. SP2D Nomor 07284/SP2D/GU/IX/2018;
7. SP2D Nomor 07773/SP2D/GU/IX/2018;
8. SP2D Nomor 09378/SP2D/TU/X/2018;
9. SP2D Nomor 10448/SP2D/GU/X/2018;
10. SP2D Nomor 12204/SP2D/TU/XI/2018;

Kecamatan Wajo;

1. SP2D Nomor 00510/SP2D/GU/IV/2018;
2. SP2D Nomor 02866/SP2D/GU/V/2018;
3. SP2D Nomor 03866/SP2D/GU/VI/2018;
4. SP2D Nomor 04991/SP2D/GU/VII/2018;
5. SP2D Nomor 05706/SP2D/GU/VIII/2018;
6. SP2D Nomor 06925/SP2D/GU/VIII/2018;
7. SP2D Nomor 11952/SP2D/GU/XI/2018;
8. SP2D Nomor 08434/SP2D/GU/IX/2018;
9. SP2D Nomor 11392/SP2D/GU/XI/2018;

Kecamatan Manggala;

1. SP2D Nomor 00133/SP2D/GU/III/2018;
2. SP2D Nomor 00476/SP2D/TU/IV/2018;
3. SP2D Nomor 02108/SP2D/GU/V/2018;
4. SP2D Nomor 02962/SP2D/TU/VI/2018;

Halaman 90 dari 108 halaman Putusan Nomor 2350 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. SP2D Nomor 05222/SP2D/TU/VII/2018;
6. SP2D Nomor 06181/SP2D/GU/VIII/2018;
7. SP2D Nomor 09291/SP2D/TU/X/2018;
8. SP2D Nomor 12237/SP2D/TU/XI/2018;

Kecamatan Biringkanaya;

1. SP2D Nomor 00115/SP2D/GU/III/2018;
2. SP2D Nomor 00444/SP2D/GU/IV/2018;
3. SP2D Nomor 00537/SP2D/TU/IV/2018;
4. SP2D Nomor 02463/SP2D/GU/V/2018;
5. SP2D Nomor 03327/SP2D/TU/VI/2018;
6. SP2D Nomor 04244/SP2D/GU/VII/2018;
7. SP2D Nomor 05270/SP2D/GU/VIII/2018;
8. SP2D Nomor 06455/SP2D/TU/VIII/2018;
9. SP2D Nomor 08802/SP2D/GU/IX/2018;
10. SP2D Nomor 10425/SP2D/GU/X/2018;
11. SP2D Nomor 11533/SP2D/GU/XI/2018;
12. SP2D Nomor 12252/SP2D/GU/XI/2018;
13. SP2D Nomor 12609/SP2D/TU/XII/2018;

Kecamatan Tallo;

1. SP2D Nomor 00491/SP2D/GU/IV/2018;
2. SP2D Nomor 01618/SP2D/GU/V/2018;
3. SP2D Nomor 02391/SP2D/GU/V/2018;
4. SP2D Nomor 03991/SP2D/GU/VII/2018;
5. SP2D Nomor 05072/SP2D/GU/VII/2018;
6. SP2D Nomor 05880/SP2D/GU/VIII/2018;
7. SP2D Nomor 09068/SP2D/GU/X/2018;
8. SP2D Nomor 11359/SP2D/GU/XI/2018;
9. SP2D Nomor 12426/SP2D/GU/XII/2018;

Kecamatan Rappocini;

1. SP2D Nomor 00293/SP2D/GU/III/2018;
2. SP2D Nomor 01996/SP2D/GU/V/2018;
3. SP2D Nomor 02838/SP2D/GU/VI/2018;

Halaman 91 dari 108 halaman Putusan Nomor 2350 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. SP2D Nomor 04058/SP2D/GU/VII/2018;
5. SP2D Nomor 05005/SP2D/GU/VIII/2018;
6. SP2D Nomor 07206/SP2D/GU/VIII/2018;
7. SP2D Nomor 08807/SP2D/GU/IX/2018;
8. SP2D Nomor 10318/SP2D/GU/X/2018;
9. SP2D Nomor 12084/SP2D/GU/XI/2018;
10. SP2D Nomor 12396/SP2D/TU/XII/2018;
11. SP2D Nomor 03866/SP2D/GU/VI/2018;

Satpol PP;

1. SP2D Nomor 00200/SP2D/TU/III/2018;
2. SP2D Nomor 01170/SP2D/TU/IV/2018;
3. SP2D Nomor 02730/SP2D/TU/V/2018;
4. SP2D Nomor 06187/SP2D/GU/VIII/2018;
5. SP2D Nomor 07969/SP2D/GU/IX/2018;
6. SP2D Nomor 09972/SP2D/GU/X/2018;
7. SP2D Nomor 12430/SP2D/TU/XII/2018;

Tahun 2019;

Kecamatan Bontoala;

1. SP2D Nomor 00123/SP2D/GU/III/2019;
2. SP2D Nomor 00170/SP2D/TU/III/2019;
3. SP2D Nomor 00433/SP2D/TU/IV/2019;
4. SP2D Nomor 04263/SP2D/TU/XI/2019;

Kecamatan Ujung Tanah;

1. SP2D Nomor 00116/SP2D/GU/III/2019;
2. SP2D Nomor 00247/SP2D/GU/IV/2019;
3. SP2D Nomor 01290/SP2D/GU/VII/2019;
4. SP2D Nomor 01551/SP2D/GU/VIII/2019;
5. SP2D Nomor 02205/SP2D/GU/IX/2019;
6. SP2D Nomor 04005/SP2D/GU/XI/2019;
7. SP2D Nomor 04649/SP2D/GU/XII/2019;

Kecamatan Ujung Pandang;

1. SP2D Nomor 00157/SP2D/GU/III/2019;

Halaman 92 dari 108 halaman Putusan Nomor 2350 K/Pid.Sus/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SP2D Nomor 00911/SP2D/GU/VI/2019;
3. SP2D Nomor 02475/SP2D/GU/X/2019;
4. SP2D Nomor 04516/SP2D/TU/XII/2019;

Kecamatan Wajo;

1. SP2D Nomor 00167/SP2D/GU/III/2019;
2. SP2D Nomor 00536/SP2D/GU/V/2019;
3. SP2D Nomor 01114/SP2D/GU/VII/2019;
4. SP2D Nomor 04786/SP2D/GU/XII/2019;

Kecamatan Panakukang;

1. SP2D Nomor 00167/SP2D/GU/III/2019;
2. SP2D Nomor 00536/SP2D/GU/V/2019;
3. SP2D Nomor 01114/SP2D/GU/VII/2019;
4. SP2D Nomor 04786/SP2D/GU/XII/2019;

Kecamatan Mariso;

1. SP2D Nomor 00235/SP2D/GU/III/2019;
2. SP2D Nomor 00336/SP2D/GU/IV/2019;
3. SP2D Nomor 00944/SP2D/GU/VI/2019;
4. SP2D Nomor 01322/SP2D/GU/VII/2019;
5. SP2D Nomor 01652/SP2D/GU/VIII/2019;
6. SP2D Nomor 02384/SP2D/GU/IX/2019;
7. SP2D Nomor 04132/SP2D/GU/XI/2019;
8. SP2D Nomor 04563/SP2D/TU/XII/2019;

Kecamatan Tamalate;

1. SP2D Nomor 00345/SP2D/GU/IV/2019;
2. SP2D Nomor 01769/SP2D/GU/VIII/2019;
3. SP2D Nomor 02792/SP2D/GU/X/2019;

Kecamatan Rappocini;

1. SP2D Nomor 00869/SP2D/GU/VI/2019;
2. SP2D Nomor 02382/SP2D/GU/IX/2019;
3. SP2D Nomor 04183/SP2D/GU/XI/2019;
4. SP2D Nomor 04506/SP2D/TU/XII/2019;

Kecamatan Mamajang;

Halaman 93 dari 108 halaman Putusan Nomor 2350 K/Pid.Sus/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SP2D Nomor 00109/SP2D/GU/III/2019;
2. SP2D Nomor 00129/SP2D/TU/III/2019;
3. SP2D Nomor 00913/SP2D/GU/VI/2019;
4. SP2D Nomor 01453/SP2D/GU/VIII/2019;
5. SP2D Nomor 02306/SP2D/GU/IX/2019;
6. SP2D Nomor 04172/SP2D/TU/XI/2019;

Kecamatan Manggala;

1. SP2D Nomor 00171/SP2D/GU/III/2019;
2. SP2D Nomor 00425/SP2D/TU/IV/2019;
3. SP2D Nomor 08923/SP2D/GU/XI/2019;

Kecamatan Biringkanaya;

1. SP2D Nomor 00100/SP2D/GU/III/2019;
2. SP2D Nomor 00564/SP2D/GU/V/2019;
3. SP2D Nomor 01160/SP2D/GU/VII/2019;
4. SP2D Nomor 01954/SP2D/GU/IX/2019;
5. SP2D Nomor 04698/SP2D/GU/XII/2019;

Kecamatan Tamalanrea;

1. SP2D Nomor 00182/SP2D/TU/III/2019;
2. SP2D Nomor 00827/SP2D/GU/VI/2019;
3. SP2D Nomor 01161/SP2D/GU/VII/2019;
4. SP2D Nomor 01481/SP2D/GU/VIII/2019;
5. SP2D Nomor 02036/SP2D/GU/IX/2019;
6. SP2D Nomor 03440/SP2D/GU/XI/2019;
7. SP2D Nomor 03897/SP2D/GU/XI/2019;
8. SP2D Nomor 04185/SP2D/GU/XI/2019;
9. SP2D Nomor 04312/SP2D/GU/XI/2019;

Kecamatan Tallo;

1. SP2D Nomor 00178/SP2D/GU/III/2019;
2. SP2D Nomor 01497/SP2D/GU/VIII/2019;
3. SP2D Nomor 01876/SP2D/GU/IX/2019;
4. SP2D Nomor 02655/SP2D/GU/X/2019;
5. SP2D Nomor 03215/SP2D/GU/X/2019;

Halaman 94 dari 108 halaman Putusan Nomor 2350 K/Pid.Sus/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. SP2D Nomor 04251/SP2D/GU/XI/2019;

Satpol PP;

1. SP2D Nomor 00153/SP2D/TU/III/2019;

2. SP2D Nomor 00956/SP2D/TU/VI/2019;

3. SP2D Nomor 01330/SP2D/TU/VII/2019;

4. SP2D Nomor 01448/SP2D/TU/VIII/2019;

5. SP2D Nomor 02476/SP2D/TU/X/2019;

6. SP2D Nomor 03385/SP2D/TU/XI/2019;

Tahun 2020;

Satpol PP;

1. SP2D Nomor 00065/SP2D/GU/II/2020;

Kecamatan Biringkanaya;

1. SP2D Nomor 00097/SP2D/GU/III/2020;

2. SP2D Nomor 00345/SP2D/GU/IV/2020;

3. SP2D Nomor 00558/SP2D/GU/VI/2020;

4. SP2D Nomor 01004/SP2D/GU/VII/2020;

5. SP2D Nomor 01170/SP2D/GU/VII/2020;

6. SP2D Nomor 01347/SP2D/GU/VIII/2020;

7. SP2D Nomor 01968/SP2D/GU/IV/2020;

8. SP2D Nomor 02464/SP2D/GU/X/2020;

9. SP2D Nomor 03558/SP2D/GU/XI/2020;

10. SP2D Nomor 04488/SP2D/GU/XII/2020;

Kecamatan Tamalate;

1. SP2D Nomor 00145/SP2D/GU/III/2020;

2. SP2D Nomor 00440/SP2D/GU/IV/2020;

3. SP2D Nomor 00580/SP2D/GU/V/2020;

4. SP2D Nomor 01066/SP2D/GU/VII/2020;

5. SP2D Nomor 01534/SP2D/GU/VIII/2020;

6. SP2D Nomor 02410/SP2D/GU/X/2020;

7. SP2D Nomor 02720/SP2D/GU/X/2020;

8. SP2D Nomor 03743/SP2D/GU/XI/2020;

Kecamatan Tallo;

Halaman 95 dari 108 halaman Putusan Nomor 2350 K/Pid.Sus/2024

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SP2D Nomor 00225/SP2D/GU/III/2020;
  2. SP2D Nomor 00394/SP2D/GU/IV/2020;
  3. SP2D Nomor 00985/SP2D/GU/VII/2020;
  4. SP2D Nomor 00125/SP2D/GU/VII/2020;
  5. SP2D Nomor 01585/SP2D/GU/IX/2020;
  6. SP2D Nomor 02046/SP2D/GU/IX/2020;
  7. SP2D Nomor 02675/SP2D/GU/X/2020;
  8. SP2D Nomor 03909/SP2D/GU/XII/2020;
  9. SP2D Nomor 00097/SP2D/GU/III/2020;
- Kecamatan Wajo;
1. SP2D Nomor 00195/SP2D/GU/III/2020;
  2. SP2D Nomor 00421/SP2D/GU/IV/2020;
  3. SP2D Nomor 00846/SP2D/GU/VI/2020;
  4. SP2D Nomor 01208/SP2D/GU/VII/2020;
  5. SP2D Nomor 01447/SP2D/GU/VIII/2020;
  6. SP2D Nomor 01893/SP2D/GU/IX/2020;
  7. SP2D Nomor .... /SP2D/GU/.... /2020 tanggal 9 Oktober 2020;
  8. SP2D Nomor 05072/SP2D/GU/XII/2020;
- Kecamatan Bontoala;
1. SP2D Nomor 00188/SP2D/GU/III/2020;
  2. SP2D Nomor 00693/SP2D/GU/VI/2020;
  3. SP2D Nomor 01260/SP2D/GU/VII/2020;
  4. SP2D Nomor 01693/SP2D/GU/IX/2020;
  5. SP2D Nomor 02923/SP2D/GU/XI/2020;
  6. SP2D Nomor 03756/SP2D/GU/XI/2020;
- Kecamatan Panakukang;
1. SP2D Nomor 00290/SP2D/GU/IV/2020;
  2. SP2D Nomor 00755/SP2D/GU/VI/2020;
  3. SP2D Nomor 01022/SP2D/GU/VII/2020;
  4. SP2D Nomor 01384/SP2D/GU/VIII/2020;
  5. SP2D Nomor 01698/SP2D/GU/IX/2020;
  6. SP2D Nomor 02371/SP2D/GU/X/2020;

Halaman 96 dari 108 halaman Putusan Nomor 2350 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. SP2D Nomor 02705/SP2D/GU/X/2020;
8. SP2D Nomor 03454/SP2D/GU/XI/2020;
9. SP2D Nomor 03905/SP2D/GU/XII/2020;

Kecamatan Makassar;

1. SP2D Nomor 00488/SP2D/GU/V/2020;
2. SP2D Nomor 00786/SP2D/GU/VI/2020;
3. SP2D Nomor 00893/SP2D/GU/VI/2020;
4. SP2D Nomor 01184/SP2D/GU/VII/2020;
5. SP2D Nomor 01459/SP2D/GU/VIII/2020;
6. SP2D Nomor 01666/SP2D/GU/IX/2020;
7. SP2D Nomor 02478/SP2D/GU/.../2020;
8. SP2D Nomor 03157/SP2D/GU/XI/2020;
9. SP2D Nomor 03949/SP2D/GU/XII/2020;

Kecamatan Ujung Pandang;

1. SP2D Nomor 00095/SP2D/GU/III/2020;
2. SP2D Nomor 00263/SP2D/GU/IV/2020;
3. SP2D Nomor 00393/SP2D/GU/IV/2020;
4. SP2D Nomor 00670/SP2D/GU/VI/2020;
5. SP2D Nomor 01099/SP2D/GU/VII/2020;
6. SP2D Nomor 02552/SP2D/GU/X/2020;

Kecamatan Rappocini;

1. SP2D Nomor 00189/SP2D/GU/III/2020;
2. SP2D Nomor 00318/SP2D/GU/IV/2020;
3. SP2D Nomor 00537/SP2D/GU/V/2020;
4. SP2D Nomor 00857/SP2D/GU/VI/2020;
5. SP2D Nomor 01183/SP2D/GU/VII/2020;
6. SP2D Nomor 01487/SP2D/GU/VIII/2020;
7. SP2D Nomor 01967/SP2D/GU/IX/2020;
8. SP2D Nomor 02613/SP2D/GU/X/2020;
9. SP2D Nomor 02927/SP2D/GU/XI/2020;
10. SP2D Nomor 03785/SP2D/GU/XI/2020;

Kecamatan Manggala;

Halaman 97 dari 108 halaman Putusan Nomor 2350 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. SP2D Nomor 00991/SP2D/GU/VII/2020;

2. SP2D Nomor 02723/SP2D/GU/X/2020;

Kecamatan Tamalanrea;

1. SP2D Nomor 00197/SP2D/GU/III/2020;

2. SP2D Nomor 00497/SP2D/GU/V/2020;

3. SP2D Nomor 00771/SP2D/GU/VI/2020;

4. SP2D Nomor 01197/SP2D/GU/VII/2020;

5. SP2D Nomor 01322/SP2D/GU/VIII/2020;

6. SP2D Nomor 01661/SP2D/GU/IX/2020;

7. SP2D Nomor 02497/SP2D/GU/X/2020;

8. SP2D Nomor 03253/SP2D/GU/XI/2020;

9. SP2D Nomor 03649/SP2D/GU/XI/2020;

10. SP2D Nomor 04042/SP2D/GU/XII/2020;

Kecamatan Mamajang;

1. SP2D Nomor 00247/SP2D/GU/IV/2020;

2. SP2D Nomor 00503/SP2D/GU/V/2020;

3. SP2D Nomor 00929/SP2D/GU/VII/2020;

4. SP2D Nomor 01274/SP2D/GU/VII/2020;

5. SP2D Nomor 01520/SP2D/GU/VIII/2020;

6. SP2D Nomor 01796/SP2D/GU/IX/2020;

7. SP2D Nomor 02814/SP2D/GU/X/2020;

8. SP2D Nomor 03478/SP2D/GU/XI/2020;

Kecamatan Mariso;

1. SP2D Nomor 00326/SP2D/GU/IV/2020;

2. SP2D Nomor 00087/SP2D/GU/III/2020;

3. SP2D Nomor 00784/SP2D/GU/VI/2020;

4. SP2D Nomor 01040/SP2D/GU/VII/2020;

5. SP2D Nomor 01129/SP2D/GU/VII/2020;

6. SP2D Nomor 01450/SP2D/GU/VIII/2020;

7. SP2D Nomor 02146/SP2D/GU/IX/2020;

8. SP2D Nomor 02384/SP2D/GU/X/2020;

9. SP2D Nomor 03247/SP2D/GU/XI/2020;

Halaman 98 dari 108 halaman Putusan Nomor 2350 K/Pid.Sus/2024

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ujung Pandang;

1. SP2D Nomor 00372/SP2D/GU/IV/2020;
2. SP2D Nomor 00566/SP2D/GU/V/2020;
3. SP2D Nomor 01078/SP2D/GU/VII/2020;
4. SP2D Nomor 01449/SP2D/GU/VIII/2020;
5. SP2D Nomor 02199/SP2D/GU/IX/2020;
6. SP2D Nomor 02449/SP2D/GU/X/2020;
7. SP2D Nomor 02917/SP2D/GU/XI/2020;
8. SP2D Nomor 04213/SP2D/GU/XII/2020;
9. Uang tunai senilai Rp7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
10. Uang tunai senilai Rp11.400.000,00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah);
11. Uang tunai senilai Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
12. Uang tunai senilai Rp61.275.000,00 (enam puluh satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
13. Uang tunai senilai Rp131.100.000,00 (seratus tiga puluh satu juta seratus ribu rupiah);
14. Uang tunai senilai Rp337.725.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
15. Uang tunai senilai Rp7.125.000,00 (tujuh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
16. Uang tunai senilai Rp213.750.000,00 (dua ratus tiga belas juta tujuh ratus lima puluh rupiah);
17. Uang tunai senilai Rp205.200.000,00 (dua ratus lima juta dua ratus ribu rupiah);
18. Uang tunai senilai Rp159.600.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
19. Uang tunai senilai Rp209.475.000,00 (dua ratus sembilan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
20. Uang tunai senilai Rp31.350.000,00 (tiga puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 99 dari 108 halaman Putusan Nomor 2350 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Uang tunai senilai Rp309.225.000,00 (tiga ratus sembilan juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
22. Uang tunai senilai Rp78.375.000,00 (tujuh puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
23. Uang tunai senilai Rp74.100.000,00 (tujuh puluh empat juta seratus ribu rupiah);
24. Uang tunai senilai Rp92.625.000,00 (sembilan puluh dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
25. Uang tunai senilai Rp135.375.000,00 (seratus tiga puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
26. Uang tunai senilai Rp25.650.000,00 (dua puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
27. Uang tunai senilai Rp116.850.000,00 (seratus enam belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
28. Uang tunai senilai Rp289.275.000,00 (dua ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
29. Uang tunai senilai Rp192.375.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
30. Uang tunai senilai Rp180.975.000,00 (seratus delapan puluh juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
31. Uang tunai senilai Rp151.050.000,00 (seratus lima puluh satu juta lima puluh ribu rupiah);
32. Uang tunai senilai Rp226.575.000,00 (dua ratus dua puluh enam juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
33. Uang tunai senilai Rp76.950.000,00 (tujuh puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
34. Uang tunai senilai Rp89.755.000,00 (delapan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);
35. Uang tunai senilai Rp125.400.000,00 (seratus dua puluh lima juta empat ratus ribu rupiah);
36. Uang tunai senilai Rp212.325.000,00 (dua ratus dua belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

*Halaman 100 dari 108 halaman Putusan Nomor 2350 K/Pid.Sus/2024*



Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Abdul Rahim, S.T.;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Oktober 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar mengajukan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 6 November 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 6 November 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar pada tanggal 11 Oktober 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Oktober 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 6 November 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undan. Oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan

*Halaman 101 dari 108 halaman Putusan Nomor 2350 K/Pid.Sus/2024*



menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Penuntut Umum. Penuntut Umum berpendapat bahwa *judex facti* tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dan tidak melaksanakan cara mengadili menurut ketentuan undang-undang karena berdasarkan fakta hukum di persidangan, seharusnya *judex facti* menyatakan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana tuntutan pidana Penuntut Umum;

Halaman 102 dari 108 halaman Putusan Nomor 2350 K/Pid.Sus/2024



- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan karena *judex facti* yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, tidak tepat dan salah atau tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;
- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah dan tidak tepat karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:
  - a. Bahwa Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2020 pada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Makassar, Terdakwa selaku Kepala Satpol PP, almarhum Muhammad Ikbil Asnan selaku Sekretaris Satpol PP dan Saksi Abdul Rahim selaku Kepala Seksi Operasional Kantor Satpol, telah mempunyai niat yang sama untuk melakukan penerbitan surat perintah yang memasukkan nama-nama fiktif di dalam Surat Perintah Tugas. Nama-nama tersebut menerima honor/tunjangan operasional yang kemudian honor/tunjangan tersebut diserahkan kepada Saksi Abdul Rahim dan almarhum Muhammad Ikbil Asnan yang selanjutnya dilaporkan kepada Terdakwa. Atas petunjuk Terdakwa lalu Saksi Abdul Rahim membagikan kepada para pejabat struktural di Satpol PP Kota Makassar dan di kecamatan-kecamatan di Kota Makassar;
  - b. Bahwa dimulai dari penerbitan surat perintah oleh Terdakwa yang memasukkan 123 (seratus dua puluh tiga) nama anggota Satpol PP Kota Makassar yang kemudian ditindaklanjuti dengan adanya perbuatan Anggota Satpol PP tersebut yang seolah-olah melaksanakan tugas di 14 (empat belas) kecamatan tersebut namun tidak pernah melaksanakan tugasnya;
  - c. Bahwa berdasarkan surat perintah yang dikeluarkan oleh Terdakwa, 14 (empat belas) Camat mengeluarkan Surat Keputusan sebagai syarat untuk melaksanakan pencairan anggaran pembayaran honorarium/tunjangan yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan se-Kota Makassar dan DPA Satpol PP Kota Makassar. Untuk menerimanya dari anggaran tersebut, Saksi

Halaman 103 dari 108 halaman Putusan Nomor 2350 K/Pid.Sus/2024



Abdul Rahim menyuruh 123 (seratus dua puluh tiga) Satpol PP yang namanya tercantum dalam surat perintah tersebut untuk membuat rekening dan ATM (Anjungan Tunai Mandiri). Selanjutnya, Saksi Abdul Rahim bersama-sama dengan almarhum Muhammad Ikbal Asnan menerima setoran dari para anggota Satpol PP tersebut;

- d. Bahwa dana hasil setoran tersebut atas perintah Terdakwa dibagikan kepada pejabat struktural di Satpol PP Kota Makassar dan kecamatan-kecamatan di Kota Makassar;
- e. Bahwa Terdakwa, Saksi Abdul Rahim dan almarhum Muhammad Ikbal Asnan bermufakat untuk menempatkan Anggota Satpol PP Kota Makassar di 14 (empat belas) kecamatan di Kota Makassar berdasarkan Surat Perintah Tugas yang ditandatangani oleh Terdakwa. Surat Perintah Tugas tersebut menempatkan anggota-anggota Satpol PP pada kecamatan-kecamatan yang berbeda pada waktu yang bersamaan (fiktif) sehingga anggota-anggota Satpol PP tersebut memperoleh honorarium, kemudian honorarium/tunjangan tersebut disetorkan kepada almarhum Muhammad Ikbal Asnan dan Saksi Abdul Rahim, yang selanjutnya dilaporkan kepada Terdakwa. Atas petunjuk Terdakwa, dana yang terkumpul dibagikan kepada para pejabat struktural tersebut;
- f. Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara/Daerah sebesar Rp4.819.432.500,00 (empat miliar delapan ratus sembilan belas juta empat ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) dari pembayaran tidak sah honor/tunjangan kepada 123 (seratus dua puluh tiga) anggota Satpol PP Kota Makassar yang namanya tercantum pada Surat Perintah Tugas dan Surat Keputusan 14 (empat belas) Camat Kota Makassar padahal anggota-anggota Satpol PP tersebut tidak melaksanakan tugas pada tempat sebagaimana yang tersebut pada Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar yang dijabat oleh Terdakwa dan Surat Keputusan 14 (empat belas) Camat Kota Makassar tersebut;

*Halaman 104 dari 108 halaman Putusan Nomor 2350 K/Pid.Sus/2024*



g. Bahwa atas kerugian keuangan Negara tersebut, para Camat selaku Pengguna Anggaran tersebut, telah melakukan pengembalian melalui Penyidik senilai kerugian tersebut yang dananya bersumber dari dana pribadi;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Terdakwa sehingga Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut" melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu Subsidiar;
- Bahwa terhadap Terdakwa tidak dijatuhi pidana tambahan berupa uang pengganti karena atas kerugian Negara tersebut, para Camat selaku Pengguna Anggaran tersebut, telah melakukan pengembalian melalui Penyidik senilai kerugian tersebut yang dananya bersumber dari dana pribadi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair. Oleh karena itu, Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

*Halaman 105 dari 108 halaman Putusan Nomor 2350 K/Pid.Sus/2024*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Makassar Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks tanggal 11 Oktober 2023 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah untuk memberantas Tindak Pidana Korupsi serta bertentangan penciptaan *good governance* (pemerintahan yang bersih) yang dicanangkan oleh pemerintah;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra Satpol PP Kota Makassar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR** tersebut;

Halaman 106 dari 108 halaman Putusan Nomor 2350 K/Pid.Sus/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks tanggal 11 Oktober 2023 tersebut;

### MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **IMAN HUD, S.IP., M.Si.**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **IMAN HUD, S.IP., M.Si.**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut”**;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Seluruh barang bukti yang selengkapya sebagaimana tersebut dan terurai dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks tanggal 11 Oktober 2023, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Abdul Rahim, S.T.;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **20 Mei 2024** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H.**, Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana

Halaman 107 dari 108 halaman Putusan Nomor 2350 K/Pid.Sus/2024



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi pada Mahkamah Agung dan **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Bungaran Pakpahan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

**Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H.**

TTD

**Yohanes Priyana, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

TTD

**Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

TTD

**Bungaran Pakpahan, S.H., M.H.**

Untuk salinan:  
MAHKAMAH AGUNG RI  
An. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196110101986122001**

*Halaman 108 dari 108 halaman Putusan Nomor 2350 K/Pid.Sus/2024*